

**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION
AGENCY (JICA)**

**KAJIAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
PENDIDIKAN DAERAH (FASE 2)
DI REPUBLIK INDONESIA
(REDIP2)**

LAPORAN AKHIR

- RANGKUMAN -

MARET 2005

**INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTER OF JAPAN
PADECO Co., LTD.**

HM

JR

05-12

**IREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION
AGENCY (JICA)**

**KAJIAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
PENDIDIKAN DAERAH (FASE 2)
DI REPUBLIK INDONESIA
(REDIP2)**

LAPORAN AKHIR

- RANGKUMAN -

MARET 2005

**INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTER OF JAPAN
PADECO Co., LTD.**

**KAJIAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN
DAERAH (FASE 2)
DI REPUBLIK INDONESIA
(REDIP2)**

**Laporan Akhir
- Rangkuman -**

Daftar Isi

BAGIAN 1 LATAR BELAKANG DAN GARIS BESAR

Bab 1	Pendahuluan	S-1
Bab 2	Tinjauan tentang Situasi Pendidikan	S-6

BAGIAN 2 PROYEK PERCONTOHAN REDIP2

Bab 3	Persiapan REDIP2: Kerangka Kerja	S-10
Bab 4	Persiapan REDIP2: Pelatihan Pra-Percontohan	S-17
Bab 5	Proyek Percontohan Tahun Pertama: Proposal	S-19
Bab 6	Proyek Percontohan Tahun Pertama: Pemantauan	S-23
Bab 7	Proyek Percontohan Tahun Pertama: Hasil dan Dampak	S-26
Bab 8	Mengembangkan Bahan dan Alat Bantu Ajar: Kegiatan Terbaik pada Proyek Percontohan Tahun Pertama	S-29
Bab 9	Menuju Proyek Percontohan Tahun Kedua	S-31
Bab 10	Proyek Percontohan Tahun Kedua: Pemantauan	S-36
Bab 11	Kerjasama dengan IMSTEP	S-39
Bab 12	Proyek Percontohan Tahun Kedua: Hasil dan Dampak	S-41
Bab 13	Pendanaan Pendidikan dan Lokalisasi REDIP	S-44

**BAGIAN 3 PETUNJUK PENINGKATAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA : APA
YANG DISARANKAN OLEH REDIP**

Bab 14	Petunjuk Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama	S-45
Bab 15	Rencana Implementasi Petunjuk Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama	S-50

RANGKUMAN

BAGIAN 1 LATAR BELAKANG DAN GARIS BESAR

Bab 1 Pendahuluan

Pendidikan Menengah Pertama di Indonesia

Sesudah Indonesia sebagian besar berhasil menyediakan pendidikan untuk semua anak pada jenjang sekolah dasar pada tahun 1990an, Pemerintah Indonesia menetapkan jenjang pendidikan menengah pertama sebagai sasaran berikutnya. Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan pendidikan dasar dari enam menjadi sembilan tahun, kemudian pada tahun 1994, Presiden menyatakan tujuan nasional untuk pendidikan menengah pertama adalah tercapainya angka partisipasi kasar (*gross enrollment rate*) atau APK sebesar 100% pada tahun 2013. Tetapi, kemajuan itu hampir terhenti pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi Asia menghantam Indonesia. Sejak itu APK untuk pendidikan menengah pertama meningkat secara perlahan-lahan dan baru mencapai 73% pada tahun 2000.

Meskipun ada peningkatan pada APK siswa, umumnya diakui bahwa kualitas pendidikan masih tertinggal. Juga menjadi perhatian khusus bahwa di balik angka-angka itu terdapat perbedaan yang tajam. Kenyataannya, lingkungan sekolah sangat berbeda antara sekolah di kota dan di desa, antara sekolah negeri dan swasta, antara sekolah besar dan kecil. Dengan mempertimbangkan keragaman Indonesia dalam hal komposisi etnik, budaya, agama, kondisi geografi dan ekonomi, dsb., tidaklah mengherankan bahwa program berskala nasional menghasilkan keluaran yang tidak sama di banyak wilayah dan di banyak masyarakat. Lebih-lebih, pada sistem sebelumnya administrasi pendidikan di Indonesia bersifat sangat terpusat, sehingga tidak memberi peluang bagi sekolah untuk melakukan prakarsa atau penyesuaian dengan kondisi setempat.

REDIP Fase 1 (REDIP1)

Berdasarkan latar belakang ini REDIP Fase 1 (atau REDIP1), studi yang mendahului REDIP Fase 2 (atau REDIP2), dirumuskan dan diimplementasikan selama dua setengah tahun (Maret 1999 – September 2001) melalui kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Tujuannya adalah

menemukan langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama di Indonesia dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan manajemen berbasis sekolah. Untuk tujuan ini, REDIP 1 merumuskan enam jenis intervensi dan mengujinya di lapangan selama kurang lebih satu tahun di 15 kecamatan yang dipilih di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Enam proyek percontohan itu adalah sebagai berikut (Komponen A dilaksanakan di semua 15 kecamatan, sedangkan hanya satu dari menu Komponen B dipilih dan dilaksanakan di setiap kecamatan):

- Komponen A: TPK (Tim Pengembangan Pendidikan Menengah Pertama Kecamatan)
- Komponen B Menu 1: KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah)
- Komponen B Menu 2: MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
- Komponen B Menu 3: Distribusi dan manajemen buku teks
- Komponen B Menu 4: BP3
- Komponen B Menu 5: Hibah (*Block grant*)

REDIP1 menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat sangat berguna sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama di Indonesia. Melalui proyek percontohan, REDIP1 menunjukkan bahwa kecamatan dapat menjadi basis yang sangat tepat untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan berbasis masyarakat.

Meskipun telah dicapai banyak keberhasilan, REDIP1 memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- 1) REDIP1 dilaksanakan dengan menggunakan kerangka lama yaitu manajemen pendidikan terpusat, sehingga tidak dirancang untuk menyesuaikan dengan sistem otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2001, yang memberi pemerintah kabupaten tanggungjawab untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Karena keterbatasan waktu, tim studi JICA REDIP1 tidak dapat memberikan pelatihan pra-percontohan yang memadai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek percontohan.
- 3) Akuntabilitas keuangan tidak dapat dijamin pada beberapa kasus, karena tidak ada sistem baku pelaporan dan pemeriksaan keuangan yang ditetapkan selama REDIP1, dan pelatihan keuangan tidak diberikan kepada para ketua TPK atau kepala sekolah.

REDIP Fase 2 (REDIP2)

Selain pertimbangan itu, pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2001 secara resmi meminta Pemerintah Jepang untuk melanjutkan program percontohan menjadi REDIP Fase 2, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, dan JICA menandatangani Memorandum Kesepahaman Kerjasama. REDIP2 direncanakan berlangsung selama tiga tahun berdasarkan Memorandum Kesepahaman itu dan dimulai pada bulan Januari 2002.

Tujuan REDIP2

Tujuan REDIP2 adalah:

- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana program untuk menghilangkan ketimpangan pendidikan menengah pertama pada daerah-daerah yang secara kualitatif dan kuantitatif berbeda dengan penekanan pada pembangunan kapasitas administrasi pendidikan lokal sejalan dengan kebijakan desentralisasi, pemberdayaan masyarakat dan manajemen berbasis sekolah; dan
- 2) Membantu memperkuat kemampuan perencanaan dari para pejabat mitra dari pihak Indonesia melalui kegiatan pelaksanaan program percontohan.

Sebanyak 39 kecamatan dipilih dari empat kabupaten/kota percontohan (10 dari Kabupaten Brebes, 9 dari Kabupaten Pekalongan, 10 dari Kabupaten Minahasa, dan 4 dari Kota Bitung). REDIP2 mencakup semua sekolah menengah pertama, yaitu SMP negeri, SMP swasta, MTs negeri, MTs swasta, dan SMP Terbuka, dan jumlah keseluruhan sekolah percontohan adalah 290.

Komponen Pokok REDIP2

Komponen pokok REDIP2 terletak pada tiga hal berikut ini:

1) TPK: Tim Pengembangan Pendidikan Menengah Pertama Kecamatan

Organisasi ini berbasis kecamatan yang didirikan melalui REDIP2. TPK berfungsi sebagai forum bagi stakeholder pendidikan untuk bertemu, berdiskusi, dan bertindak. KKKS dan MGMP ditata ulang sebagai organisasi berbasis kecamatan di bawah TPK.

2) Perlakuan sama terhadap semua sekolah

REDIP2 mencakup semua pendidikan menengah pertama di suatu kecamatan: SMP Negeri, SMP Swasta, MTs Negeri dan MTs Swasta. Tidak ada pemisahan antara sekolah-sekolah tersebut dalam REDIP2.

3) Proposal dan Block grant

Di bawah REDIP2, TPK dan sekolah menerima bantuan berbentuk dana hibah (*block grant*) untuk membiayai kegiatan mereka. Namun, untuk menerima hibah tersebut, TPK dan sekolah harus menyiapkan proposal yang disetujui oleh Dinas P&K Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya, TPK diperbolehkan dan sebaiknya melakukan kegiatan yang menurut anggapan TPK tepat dan efektif untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama di kecamatan tersebut. Tetapi, sebagai persyaratan minimum, setiap kegiatan mereka harus meliputi tiga kategori berikut ini:

- (1) Kegiatan umum
- (2) Kegiatan KKKS
- (3) Kegiatan MGMP

Seperti TPK, sekolah diperbolehkan dan sebaiknya melakukan kegiatan yang menurut anggapan sekolah tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Tetapi, kegiatan yang dilakukan tersebut harus berdasarkan rencana peningkatan mutu sekolah yang disusun sebelum pengajuan proposal, dan harus bertujuan meningkatkan komponen-komponen berikut:

- (1) Kurikulum dan proses belajar-mengajar
- (2) Sumber daya manusia
- (3) Manajemen sekolah
- (4) Lingkungan sekolah/kelas

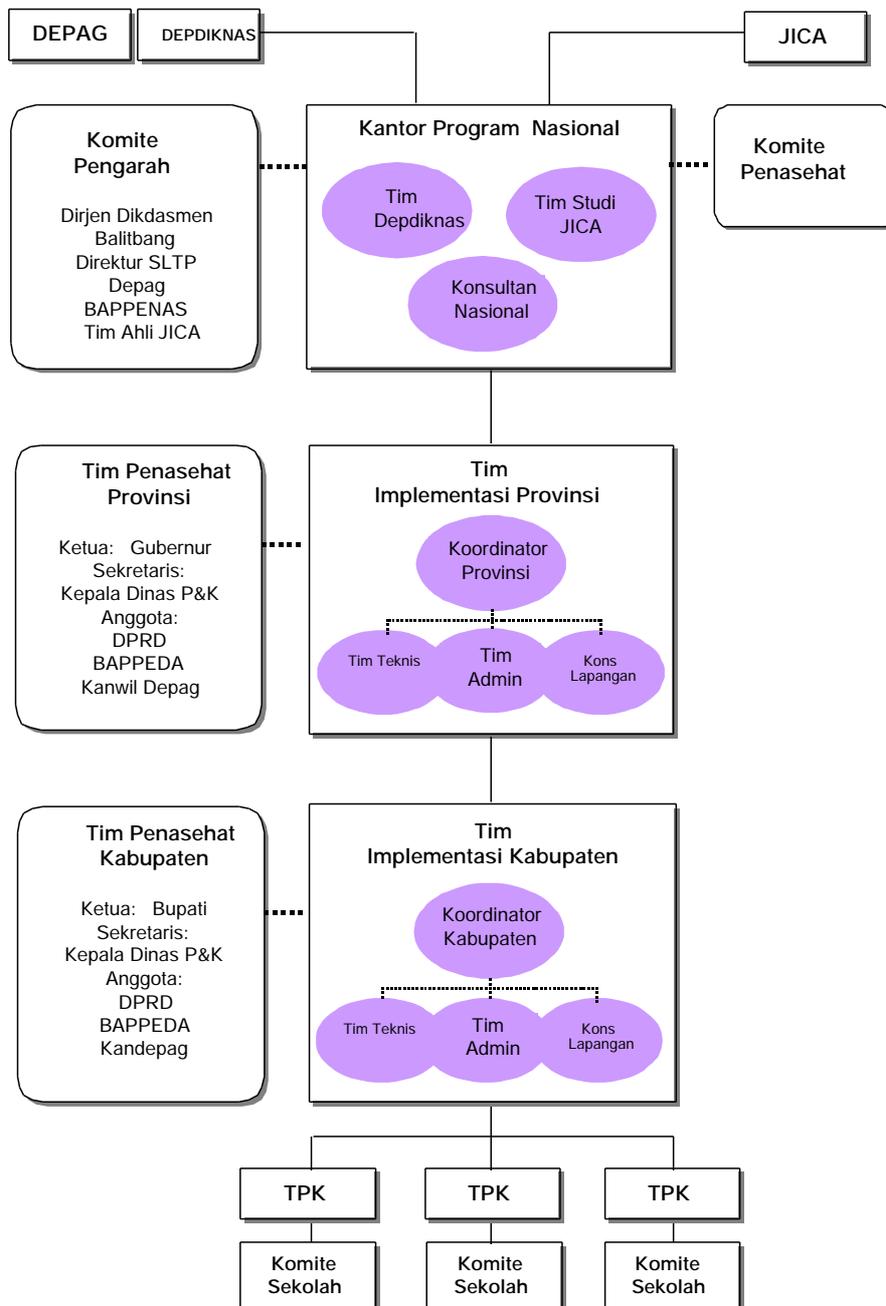
Struktur Organisasi REDIP2

Kantor Program Nasional (KPN) dan tim diorganisasi pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan REDIP2 (periksa Gambar 1-1). TPK didirikan di setiap kecamatan untuk mengkoordinasikan kegiatan antar sekolah dan memantau kegiatan masing-masing sekolah. Berdasarkan sistem pemerintahan otonomi, kabupaten/kota memiliki peran sangat penting. Pengaturan organisasi oleh REDIP2 semacam itu, dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas, bertujuan mendukung kapasitas operasional dan administrasi Dinas P&K kabupaten/kota dan kecamatan dalam mengelola desentralisasi pendidikan.

Jadwal Pelaksanaan REDIP2

REDIP2 telah dilaksanakan selama tiga tahun dari Januari 2002 sampai dengan Januari 2005. Keseluruhan periode itu dibagi menjadi empat tahap:

Tahap 1	Persiapan pra-percontohan	Januari 2002 – Juni 2002
Tahap 2	Proyek Percontohan (Tahun1)	Juli 2002 – Juni 2003
Tahap 3	Proyek Percontohan (Tahun2)	Juli 2003 – Juni 2004
Tahap 4	Penyelesaian pasca-percontohan	Juli 2004 – Januari 2005



Gambar 1-1: Struktur Organisasi REDIP2

Bab 2 Tinjauan tentang Situasi Pendidikan

Undang-Undang dan Kebijakan Pengembangan Pendidikan di Indonesia

Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, menerangkan secara garis besar program-program yang bertujuan agar sekolah menengah pertama berpartisipasi dalam:

1. Menyediakan akses pendidikan yang lebih luas kepada semua anak di masyarakat;
2. Meningkatkan kesamaan peluang kepada anak-anak yang miskin;
3. Meningkatkan mutu pendidikan yang disediakan pada jenjang ini; dan
4. Mewujudkan implementasi manajemen berbasis sekolah dan masyarakat.

Pada bulan April 2003, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Departemen Pendidikan Nasional, mengeluarkan kebijakan operasional untuk menindaklanjuti Program Pembangunan Nasional tersebut. Kebijakan operasional menetapkan tiga kelompok masalah yang harus diatasi:

1. Masalah akses pendidikan.
2. Masalah peningkatan mutu.
3. Masalah desentralisasi pendidikan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Berkaitan dengan program pembelajaran, Depdiknas telah merampungkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal ini menandai pergantian dari pendekatan kurikulum 1984 dan 1994. Buku kurikulum untuk setiap mata pelajaran telah dikirimkan ke semua kabupaten/kota. Setiap buku berisi kompetensi dan indikatornya yang harus dipelajari oleh siswa pada setiap tingkatan kelas. Sistem pendidikan setempat bertanggungjawab untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang mereka terapkan.

Melalui REDIP2, banyak sekolah bersedia melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2003, meskipun KBK secara resmi dimulai pada bulan Juli 2004. Banyak guru telah mengujicobakan metode pembelajaran aktif seperti pembelajaran kontekstual (CTL) di kelas mereka. Kebanyakan guru mata pelajaran inti (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) telah menyiapkan silabus (program tahunan dan program semester) selain rencana mengajar sebelum mereka mengajar, sesudah mengikuti pelatihan melalui MGMP selama REDIP2.

Desentralisasi Sektor Pendidikan

Kebijakan baru Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah ditetapkan dalam UU No. 22, 1999 tentang "Pemerintah Daerah," yang mengalihkan fungsi dan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Gambar 2-1 menunjukkan perubahan struktur pemerintahan daerah sesudah otonomi daerah. Ini berarti bahwa kewenangan dan tanggungjawab tambahan dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintah daerah yang otonom sekarang langsung bertanggungjawab kepada DPRD, sedangkan lembaga departemen di daerah telah dihapuskan dan digabungkan dengan dinas-dinas pemerintah daerah.

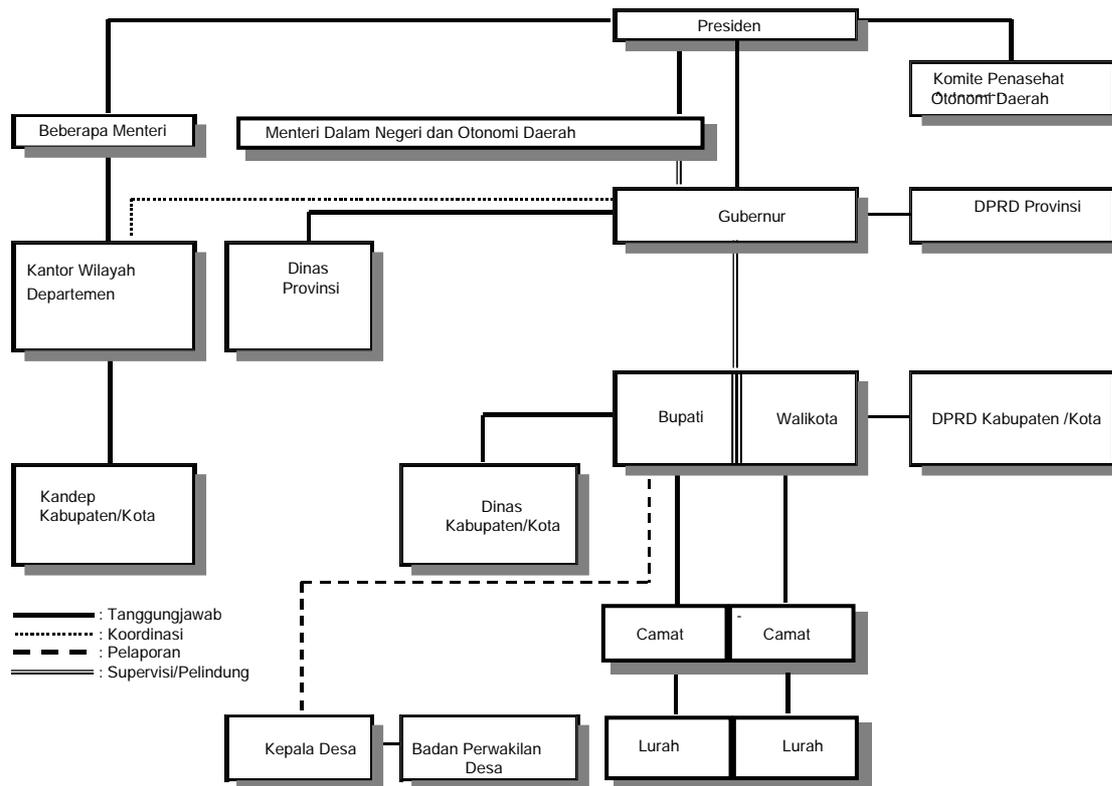
Sejak otonomi daerah diberlakukan pada 1 Januari 2001, kewenangan administratif dari sektor pendidikan ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota. Meskipun informasi tentang penggabungan kantor departemen di daerah (Kanwil di tingkat provinsi, Kandep di tingkat kabupaten, Kancam di tingkat kecamatan) dengan dinas pemerintah daerah tersedia di berbagai kantor/dinas, belum ada petunjuk kongkrit yang dikeluarkan tentang kantor/dinas mana yang diambil alih atau kantor/dinas mana yang dipertahankan. 'Penggabungan' itu sekedar penyerapan tenaga kerja dari kantor/dinas satu kepada kantor/dinas lainnya. Tabel 2-1 menyajikan ringkasan umum yang menunjukkan perubahan pengelolaan pendidikan menengah pertama sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pada tanggal 2 April 2002, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dikeluarkan. Dalam Keputusan itu dinyatakan bahwa:

- 1) Dewan Pendidikan dibentuk di setiap kabupaten/kota berdasarkan prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- 2) Pada setiap satuan pendidikan atau lembaga pendidikan, dibentuk Komite Sekolah berdasarkan prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Dewan Pendidikan didirikan di tingkat kabupaten/kota, dan Komite Sekolah didirikan di tingkat satuan pendidikan; dan
- 4) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah lembaga independen, tidak memiliki hubungan hirarkis dengan pemerintah daerah atau lembaga pemerintah.

Dalam Petunjuk REDIP2, kecamatan dan sekolah yang menjadi proyek percontohan diminta membentuk TPK (Tim Pengembangan Pendidikan Menengah Pertama Tingkat Kecamatan) dan Komite Sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk selama REDIP2 tidak boleh berbedanya dengan Komite Sekolah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri. Komite Sekolah REDIP2 memiliki tujuan, peran dan fungsi yang sama dengan Komite Sekolah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri.



Gambar 2-1: Pemerintahan Daerah Sesudah Otonomi

Tabel 2-1: Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama sebelum dan sesudah Otonomi Daerah

Fungsi	Sebelum otonomi	Sesudah otonomi
Perencanaan dan Pemrograman Sistem:		Tim yang dikordinasi BAPPEDA-Kabupaten yang memasukkan semua lembaga
Rancangan dan Isi Kurikulum: <u>a/</u>	Depdikbud	Depdiknas/Dinas P&K Propinsi / Dinas P&K Kabupaten / Sekolah
Pemilihan Buku Teks:	Depdikbud	Sekolah
Penyediaan Buku Teks:	Depdikbud	Dinas P&K Kabupaten
Isi Pelatihan Guru:	Depdikbud / Kanwil	Depdiknas (Berbasis Proyek) / (<i>Dinas P&K Propinsi</i>)
Pelayanan Pelatihan Guru:	Kanwil	<i>Dinas P&K Kabupaten</i>
Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat Guru:	Depdikbud / Kanwil	Bupati / Walikota
Supervisi Guru:	Kandep	Dinas P&K Kabupaten
Evaluasi dan Pengukuran Program Pendidikan:	Depdikbud	Depdiknas
Pembangunan/Perbaikan Besar Gedung Sekolah	Kanwil / Depdikbud	Dinas P&K Propinsi / Dinas P&K Kabupaten
Perbaikan dan Pemeliharaan Sekolah:	Depdikbud / Kanwil	<i>Masyarakat/ Sekolah</i>

Peralatan dan Perabot Sekolah:	Kanwil	Dinas P&K Kabupaten bersama Sekolah
--------------------------------	--------	-------------------------------------

a/ Kebijakan sekarang memungkinkan sekolah menyusun kurikulum mereka sendiri yang jumlahnya sekitar 20 - 40 persen dari keseluruhan isi kurikulum.

Catatan: Yang tercetak miring menunjukkan perubahan yang diusulkan dari penanggungjawab sebelumnya.

Manajemen Berbasis Sekolah

Pada bulan April 2001, Departemen Pendidikan Nasional merevisi Seri Buku tentang Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang diterbitkan pada tahun 2000. MPMBS bertujuan menjadikan sekolah mandiri atau memiliki keberdayaan dengan memberikan kepada sekolah dan mendorong sekolah melakukan pengambilan keputusan partisipatif. Dengan konsep MPMBS, sekolah sekarang diberi wewenang untuk membuat perencanaan sekolah dan pengelolaan kurikulum mereka sendiri, supaya sekolah menjadi lebih mandiri dan berdaya. Ini menyiratkan bahwa sekolah adalah satuan pokok kegiatan pendidikan, sedangkan birokrat dan unsur lainnya adalah unit layanan pendukung. Oleh karena itu, gaya manajemen lama yang menekankan subordinasi, arahan, pengaturan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh sedikit pejabat perlu diganti dengan gaya manajemen baru yang menekankan otonomi, pendampingan, pemupukan motivasi sekolah sendiri, pemberian bantuan dan pengambilan keputusan bersama.

Pendanaan Pendidikan sesudah Otonomi Daerah

Sesudah otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk merancang, meneliti, menyetujui, dan mencairkan dana untuk layanan publik. Bagi pendidikan menengah pertama (dan pendidikan SD), Dinas P&K Kabupaten/Kota menyiapkan rencana anggaran pendidikan yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran itu harus mendapat persetujuan dari Bupati, sebelum usulan anggaran itu diajukan ke DPRD untuk persetujuan akhir. Sumber utama APBD pemerintah kabupaten/kota adalah DAU (Dana Alokasi Umum), yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan secara langsung dialokasikan ke kabupaten/kota. Meskipun kabupaten/kota bertanggungjawab menyusun APBD, sebagian besar APBD didanai melalui DAU. Dengan demikian, secara umum kabupaten/kota masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam masalah keuangan. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah kunci bagi konsolidasi lebih lanjut otonomi daerah di Indonesia dilihat dari sudut kewenangan dan keuangan.

BAGIAN 2 PROYEK PERCONTOHAN REDIP2

Bab 3 Persiapan REDIP2: Kerangka Kerja

Cakupan Sekolah

REDIP1 mencakup semua jenis pendidikan menengah pertama: SMP negeri dan swasta, MTs negeri dan swasta, dan SMP Terbuka, dan memperlakukan sekolah-sekolah tersebut secara sederajat dalam proyek percontohan. Pengaturan semacam ini merupakan hal baru di Indonesia karena SMP dan MTs dikelola oleh dua departemen yang berbeda dan proyek pengembangan pendidikan biasanya hanya ditujukan pada salah satu dari sekolah-sekolah tersebut (misalnya MTs saja, SMP swasta saja, SMP Terbuka saja, atau sekolah-sekolah yang terpilih saja). Pengaturan baru ini dapat berjalan dengan baik dan menciptakan rasa persatuan dan persahabatan antara sekolah dan masyarakat. Maka, REDIP2 menerapkan model yang sama dengan REDIP1. REDIP2 mencakup semua pendidikan menengah pertama di kecamatan tertentu tanpa melihat status atau afiliasinya.

Pemilihan Kabupaten/Kota

Ketika diputuskan untuk memperpanjang REDIP Fase 2, dan memperluas cakupannya, pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimana memilih kabupaten/kota dan kecamatan percontohan untuk Fase 2. Jumlah keseluruhan sekolah target harus kurang dari 400, karena mempertimbangkan urusan administratifnya. Mengingat keterbatasan ini, terdapat dua kemungkinan alternatif pengaturannya:

- 1) Memilih beberapa kecamatan saja dari satu kabupaten/kota, dan memilih sebanyak mungkin kabupaten/kota. (pengaturan REDIP1)
- 2) Memilih beberapa kabupaten/kota saja, tetapi mencakup semua kecamatan dalam kabupaten itu.

Pengalaman selama REDIP1 lebih menyetujui alternatif kedua, yang akan menjamin bahwa kabupaten/ kota sepenuhnya dilibatkan dalam proyek percontohan. Tetapi, pembatasan maksimum sebanyak 400 sekolah berarti dalam kenyataannya kita akan mencakup hanya satu kabupaten/kota dari setiap provinsi. Keadaan ini merupakan hal yang berlebihan yang harus dihindari. Jadi, kesimpulan kami adalah kompromi: dua kabupaten/kota dari setiap provinsi dan separuh jumlah kecamatan dari setiap kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang terpilih adalah sebagai berikut:

Jawa Tengah

Kabupaten Brebes	Daerah yang berprestasi paling baik dalam REDIP1
Kabupaten Pekalongan	Daerah yang berprestasi paling baik dalam COPSEP 2001

Sulawesi Utara

Kabupaten Minahasa	Kelanjutan dari REDIP1
Kota Bitung	Kelanjutan dari REDIP1

Pemilihan Kecamatan

Jumlah keseluruhan kecamatan percontohan mula-mula ditetapkan sebanyak 33 mengingat keterbatasan administratif dan anggaran yang disediakan oleh Tim Studi. Jumlah itu kemudian dialokasikan di antara empat kabupaten/kota yang terpilih di atas: 10 (dari 17) untuk Brebes, 9 (dari 16) untuk Pekalongan, 10 (dari 30) untuk Minahasa dan 4 (dari 5) untuk Bitung. Kecamatan percontohan yang terpilih dicantumkan dalam Tabel 3-1. Pada dasarnya, semua kecamatan percontohan dan kecamatan kelompok kontrol di kabupaten/kota yang sebelumnya menjadi daerah REDIP1 dipilih terlebih dahulu, kemudian Dinas P&K dari masing-masing kabupaten/kota mengusulkan kecamatan lainnya.

Tabel 3-1: Kecamatan Percontohan dan Jumlah Sekolah Target selama REDIP2

Kabupaten/ Kota	Pilot Kecamatan	SLTP			MTs			SLTP/MTs	SLTP	School	REDIP 1 Status
		Public	Private	Total	Public	Private	Total	Total	Terbuka	Total	
Brebes	Brebes	7	3	10	1	2	3	13	1	14	
	Wanasari	4	2	6	1	2	3	9	1	10	
	Bulakamba	3	4	7	0	5	5	12	1	13	
	Tanjung	3	0	3	0	2	2	5	1	6	
	Losari	3	1	4	0	4	4	8	1	9	
	Jatibarang	4	1	5	0	2	2	7	1	8	Control group
	Larangan	3	1	4	0	6	6	10	0	10	
	Ketanggungan	3	2	5	1	3	4	9	1	10	Pilot
	Kersana	3	0	3	0	2	2	5	0	5	Control group
	Banjarharjo	3	0	3	0	5	5	8	1	9	Pilot
Total		36	14	50	3	33	36	86	8	94	
Pekalongan	Tirto	2	0	2	0	1	1	3	2	5	(COPSEP)
	Wiradesa	5	2	7	0	2	2	9	1	10	(COPSEP)
	Sragi	5	1	6	0	1	1	7	2	9	
	Kedungwuni	4	4	8	1	4	5	13	1	14	(COPSEP)
	Wonopringgo	1	2	3	0	2	2	5	1	6	
	Karanganyar	2	0	2	0	2	2	4	1	5	
	Bojong	3	1	4	0	1	1	5	1	6	
	Kajen	4	1	5	0	1	1	6	2	8	(COPSEP)
	Kesesi	3	2	5	1	1	2	7	1	8	
Total		29	13	42	2	15	17	59	12	71	
Central Java Total		65	27	92	5	48	53	145	20	165	
Minahasa	Likupang	5	12	17	0	0	0	17	1	18	Pilot
	Wori	3	2	5	0	0	0	5	1	6	Control group
	Tondano	5	3	8	0	1	1	9	0	9	Control group
	Kombi	3	3	6	0	0	0	6	0	6	Pilot
	Tompaso	2	3	5	0	0	0	5	0	5	Control group
	Tareran	5	6	11	0	0	0	11	0	11	Control group
	Tumpan	4	1	5	0	0	0	5	1	6	
	Tombatu	6	4	10	0	0	0	10	1	11	Pilot
	Tenga	7	3	10	0	1	1	11	1	12	Pilot
	Motoling	8	6	14	0	0	0	14	1	15	
Total		48	43	91	0	2	2	93	6	99	
Bitung	Bitung Utara	5	2	7	0	1	1	8	1	9	
	Bitung Tengah	1	6	7	0	0	0	7	0	7	Pilot
	Bitung Timur	1	3	4	0	1	1	5	0	5	
	Bitung Selatan	3	1	4	0	0	0	4	1	5	Control group
Total		10	12	22	0	2	2	24	2	26	
North Sulawesi Total		58	55	113	0	4	4	117	8	125	
REDIP 2 Total		123	82	205	5	52	57	262	28	290	

Sumber: Tim Studi JICA

Konsultan Lapangan

Konsultan lapangan memegang peran yang sangat penting selama REDIP1. Sebanyak delapan orang konsultan lapangan diberi tugas untuk menangani masing-masing dua kecamatan. Sebagai pendamping, mereka membantu TPK dan sekolah untuk melaksanakan setiap tahap dalam proyek percontohan. Keberhasilan yang besar dari TPK dan sekolah banyak bergantung kepada layanan profesional dan dedikasi dari konsultan. Dengan melihat kinerja mereka secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa menugasi satu orang konsultan untuk dua kecamatan dapat berjalan dengan baik. Tim mewawancarai sejumlah calon dan memilih 16 Konsultan lapangan seperti tercantum dalam Tabel 3-2.

Tabel 3-2: Pemilihan Konsultan Lapangan untuk REDIP2

Provinsi	Pelamar	Diwawancarai	Diterima
Jawa Tengah	14	12	9
Sulawesi Utara	8	8	7
Jumlah	22	20	16

Konsultan Nasional

Selama REDIP1, satu orang konsultan nasional direkrut terutama untuk memberi nasehat dan mengawasi ke delapan konsultan lapangan. Tetapi, ternyata konsultan nasional dapat memberikan layanan yang lebih banyak selama REDIP2 dengan menyampaikan pesan tentang model REDIP tidak hanya kepada orang-orang yang terlibat dalam REDIP2 tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum. Dengan demikian, tim memutuskan untuk mengangkat konsultan nasional yang sama, tetapi deskripsi kerjanya disesuaikan.

Komponen Proyek Percontohan

Dalam REDIP2, proyek percontohan terdiri atas dua komponen: Komponen A untuk kecamatan dan Komponen B untuk sekolah. Komponen A adalah untuk membentuk dan mendukung Tim Pengembangan Pendidikan Menengah Pertama tingkat Kecamatan (TPK), dan Komponen B diarahkan kepada masing-masing sekolah di setiap kecamatan, tetapi isinya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah. Komponen A terdiri atas kegiatan umum oleh TPK, kegiatan KKKS oleh kepala sekolah dan kegiatan MGMP oleh guru mata pelajaran. Berbeda dengan REDIP1, Komponen B dalam REDIP2 tidak lagi menawarkan "menu" untuk dipilih oleh sekolah. Sekolah bebas mengusulkan kegiatan apa saja yang dianggap perlu untuk dilaksanakan asalkan kegiatan itu sesuai dengan rencana jangka menengah yang mereka susun dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam buku petunjuk.

TPK dan Kegiatan-Kegiatannya

TPK beranggotakan wakil-wakil dari tujuh unsur stakeholder pendidikan:

- Kantor Kecamatan
- Cabang Dinas P & K Kecamatan
- Kepala SMP/MTs
- BP3/Komite Sekolah
- Guru SMP/MTs
- Tokoh Masyarakat dan/atau tokoh agama

Kepala Desa

Sekurang-kurangnya satu orang wakil dari tujuh unsur di atas harus ada. Tetapi, karena alasan administrasi jumlah keseluruhan anggota TPK tidak boleh lebih dari 30 orang. TPK harus memilih Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Internal Auditor dari anggota TPK. Selain itu, External Auditor diangkat oleh Dinas P&K Kabupaten/Kota. Kegiatan TPK terdiri atas 1) kegiatan-kegiatan umum, 2) kegiatan-kegiatan KKKS, dan 3) kegiatan-kegiatan MGMP.

Komite Sekolah dan Kegiatan-Kegiatannya

Setiap sekolah percontohan wajib membentuk Komite Sekolah. Tetapi, jika Komite Sekolah sudah terbentuk berdasarkan program jaringan pengaman sosial, tidak perlu dibentuk Komite yang baru. Pada dasarnya, Komite Sekolah terdiri atas:

- Kepala Sekolah
- Wakil BP3
- Wakil Guru
- Wakil OSIS
- Wakil masyarakat

Komite Sekolah harus memilih Ketua, Bendahara, dan Internal Auditor. Seperti halnya dengan TPK, External Auditor juga diangkat oleh Dinas P&K Kabupaten/Kota.

Kegiatan sekolah percontohan dalam REDIP2 harus bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sasaran utamanya adalah:

- Kurikulum/proses belajar-mengajar
- Sumber daya manusia
- Manajemen sekolah
- Lingkungan sekolah/kelas

Alokasi Dana

Dalam REDIP2, jumlah dana yang diterima TPK atau sekolah ditentukan dan diumumkan sebelum dimulai proses penyusunan proposal.

Untuk TPK, jumlah keseluruhan dana dihitung dengan cara sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--|
| Alokasi dasar | Semua TPK menerima jumlah yang sama, masing-masing Rp. 25 juta. |
| Alokasi proporsional | Dana sisanya dialokasikan secara proporsional dengan menghitung jumlah SMP/MTs di kecamatan. |

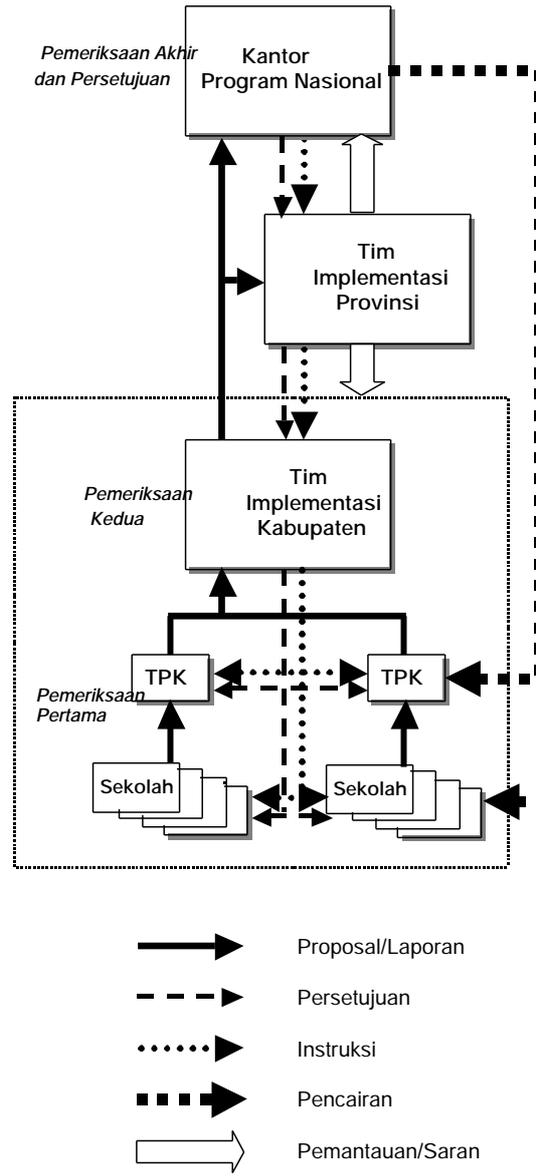
Alokasi dasar (tambahan) Rp. 6 juta ditambahkan lagi terhadap alokasi dasar di atas untuk mengganti kerugian akibat penyusutan nilai tukar rupiah.

Untuk sekolah, total dana yang dialokasikan mengikuti lima kategori di bawah ini:

Alokasi dasar	Semua SMP/MTs menerima jumlah yang sama, masing-masing Rp. 15 juta.
Tambahan 1	Sekolah yang tidak menerima bantuan dari proyek lain selama 2 tahun terakhir masing-masing menerima tambahan sebesar Rp. 10 juta.
Tambahan 2	Sekolah yang memiliki SMP Terbuka tetapi tidak menerima hibah dari program kecakapan hidup masing-masing menerima tambahan sebesar Rp. 5 juta. Dana ini harus digunakan untuk kegiatan yang mempromosikan dan meningkatkan Sekolah Terbuka.
Tambahan 3	Sekolah yang terletak di lokasi terpencil masing-masing menerima tambahan sebesar Rp. 3 juta.
Tambahan 4	Dana sisanya dialokasikan kepada semua sekolah dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah siswa.

Arus Dana

Gambar 3-1 menunjukkan bagaimana dana mengalir dari Tim Studi JICA kepada masing-masing penerima.



Gambar 3-1: Arus Dana REDIP2

Bab 4 Persiapan REDIP2: Pelatihan Pra-Percontohan

Program Pelatihan Pra-Percontohan

Karena terjadinya hambatan pada REDIP1 seperti kesalahpahaman, kesalahan komunikasi, dan kurangnya motivasi di kalangan mereka yang terlibat dalam proyek percontohan terutama diakibatkan kurangnya pelatihan sebelum proyek percontohan, dalam REDIP2, diprogramkan serangkaian pelatihan pra-percontohan agar peserta kegiatan REDIP2 benar-benar memahami isi dari proyek tersebut sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka.

REDIP2 memprogramkan lima macam pelatihan: (1) Pelatihan 2 dan 3 hari untuk Konsultan Lapangan, (2) Pelatihan 5 hari untuk Staf Kabupaten/Kota, (3) Sosialisasi TPK dan Komite Sekolah, (4) Pelatihan 5 hari untuk TPK dan Komite Sekolah, dan (5) Pelatihan 1 hari untuk Bendahara dan Auditor TPK dan Komite Sekolah. Tabel 4-1 di bawah ini berisi jadwal Pelatihan Pra-Percontohan selama REDIP2.

Tabel 4-1: Jadwal Pelatihan Pra-Percontohan selama REDIP2

Judul Pelatihan	Tanggal / Tempat	Peserta Pelatihan (Jumlah Orang)	Pendamping	Bahan Pelatihan
Pelatihan 3-Hari untuk Konsultan Lapangan	- 27 Februari – 1 Maret/ Jakarta	- Konsultan Lapangan (17) - Koordinator Provinsi & Kabupaten (12)	Tim studi JICA	- EP
Pelatihan 5-Hari untuk Staf Kabupaten/Kota	- 1 – 5 April / Semarang - 8 – 12 April / Manado	- Pejabat Kabupaten (36)	Konsultan Lapangan, Tim studi JICA	- EP - FM
Pelatihan 2-Hari untuk Konsultan Lapangan	- 17 – 18 April / Jakarta	- Konsultan Lapangan (17) - Koordinator Provinsi & Kabupaten (12)	Tim studi JICA	- G (TPK) - G (Sekolah) - FG (TPK) - FG (Sekolah)
Sosialisasi TPK dan Komite Sekolah	- 24 April / Brebes - 25 April / Pekalongan - 30 April / Bitung - 1 – 2 Mei / Minahasa	- Pejabat Provinsi (10) - Pejabat Kabupaten (62) - Pegawai Kecamatan (99) - Kepala Sekolah (262)	Tim studi JICA, Koordinator Provinsi	- G (TPK) - G (Sekolah)
Pelatihan 5-Hari untuk TPK dan Komite Sekolah	- 29 April – 17 Mei / setiap Kecamatan di Jateng - 6 – 24 Mei / setiap Kecamatan di Sulut	- anggota TPK (660) - anggota Komite Sekolah (786)	Konsultan Lapangan, Koordinator Provinsi & Kabupaten	- EP - G (TPK) - G (Sekolah) - FG (TPK) - FG (Sekolah)
Pelatihan 1-Hari bagi Bendahara dan auditor TPK dan Komite Sekolah	- 16-18 Juli / setiap Kecamatan di Jateng - 1 – 4 Juli / setiap Kecamatan di Sulut	- Bendahara dan auditor	Konsultan Lapangan, Koordinator Provinsi & Kabupaten	- FM - FG (TPK) - FG (Sekolah)

<Keterangan>

Jateng: Provinsi Jawa Tengah, Sulut: Provinsi Sulawesi Utara, EP: modul tentang Perencanaan Pendidikan, FM: modul tentang Manajemen Keuangan, G (TPK), G (Sekolah): Petunjuk untuk TPK, Petunjuk untuk SMP dan MTs, FG (TPK), FG (Sekolah): Petunjuk Keuangan untuk TPK, Petunjuk Keuangan untuk SMP dan MTs

Bahan Pelatihan

Untuk pelatihan pra-percontohan, disiapkan enam jenis bahan pelatihan berikut ini:

- Modul tentang Perencanaan Pendidikan (EP)
- Modul tentang Manajemen Keuangan (FM)
- Petunjuk untuk TPK (G TPK)
- Petunjuk untuk SMP dan MTs (G Sekolah)
- Petunjuk Keuangan untuk TPK (FG TPK)
- Petunjuk Keuangan untuk SMP dan MTs (FG Sekolah)

Semua bahan disusun dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Kinerja Program-Program Pelatihan

Apabila semua isi bahan pelatihan tidak dapat disajikan selama pelatihan karena keterbatasan waktu, pendamping/penceramah memusatkan pada bagian-bagian pokok dari setiap bahan. Meskipun Tim studi JICA mengembangkan program standar untuk setiap jenis pelatihan, dua tim provinsi boleh memodifikasi program-program itu sesuai dengan kondisi dan keadaan khusus mereka.

Para peserta aktif menghadiri program pelatihan, yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap REDIP2. Pada setiap program pelatihan, peserta diminta mengisi angket evaluasi. Berdasarkan tanggapan peserta, dapat disimpulkan bahwa pelatihan-pelatihan itu sangat bermanfaat bagi para peserta untuk memahami isi proyek percontohan dan melaksanakan kegiatan percontohan.

Bab 5 Proyek Percontohan Tahun Pertama: Proposal

Cara Penyusunan Proposal

Sebelum proyek percontohan dilaksanakan oleh TPK dan sekolah, wakil-wakil TPK dan Komite Sekolah mengikuti tiga jenis pelatihan yang diadakan di masing-masing kecamatan.

- Sosialisasi TPK dan Komite Sekolah;
- Pelatihan 5-Hari untuk TPK dan Komite Sekolah; dan
- Pelatihan 1-Hari untuk Bendahara dan Auditor TPK dan Komite Sekolah

Sesudah menerima pelatihan 5-hari yang dijadwalkan pada bulan Mei 2002, semua TPK dan sekolah menyusun rencana pengembangan TPK dan sekolah dengan mengikuti format yang disampaikan selama pelatihan. TPK dan Komite Sekolah harus melaksanakan tugas ini. Pada hari terakhir Pelatihan 5-Hari untuk TPK dan Komite Sekolah, setiap TPK dan sekolah mulai menyusun proposal kegiatan untuk REDIP2 (Tahun 2002/03). Proposal harus berdasarkan dan sesuai dengan rencana pengembangan TPK dan sekolah.

Petunjuk untuk TPK: Kegiatan-Kegiatan TPK

Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan TPK yang tercantum dalam Petunjuk untuk TPK:

1) Kegiatan-Kegiatan Umum

Sebagai organisasi berbasis kecamatan, TPK hendaknya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terutama diarahkan pada masyarakat luas. Kegiatan-kegiatan itu hendaknya tidak boleh mencampuri kegiatan-kegiatan sekolah. Jika TPK mengadakan kegiatan yang menyangkut sekolah, kegiatan itu hendaknya bersifat antar sekolah, dengan mengundang semua sekolah untuk berpartisipasi.

- "Forum Masyarakat"
- "Perencanaan Pendidikan Menengah Pertama Tingkat Kecamatan"
- "Kampanye Peningkatan Kesadaran Tentang Pendidikan"
- "Penggalian Dana"
- "Lomba Olahraga Antar Sekolah"
- "Lomba Seni dan Pameran"
- "Lomba Mata Pelajaran"
- "Pemantauan Proyek Percontohan REDIP2"

2) Kegiatan-Kegiatan KKKS

Atas prakarsa TPK, KKKS ditata ulang sebagai organisasi yang beranggotakan semua kepala sekolah SMP dan MTs di masing-masing kecamatan. KKKS ini mengadakan pertemuan secara teratur untuk bertukar informasi dan sumber daya serta berbagi tentang

pengetahuan profesional mereka mengenai bagaimana mengelola sekolah dan meningkatkan mutu sekolah secara lebih baik. Beberapa kegiatan yang disarankan adalah sebagai berikut:

- "Forum Kerjasama SMP-MTs"
- "Konsorsium SMP Terbuka"
- "Koordinasi Pendaftaran Siswa Baru"
- "Karyawisata"
- "Pelatihan Manajemen Sekolah"

3) Kegiatan-Kegiatan MGMP

Seperti halnya KKKS, MGMP model baru untuk mata pelajaran inti diatur oleh TPK yang beranggotakan guru-guru dari SMP dan MTs di kecamatan. MGMP mengadakan pertemuan secara teratur berdasarkan mata pelajaran untuk berbagi dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesional anggotanya tentang proses belajar dan mengajar. Beberapa kegiatan yang disarankan adalah sebagai berikut:

- "Pelatihan Guru Mata Pelajaran"
- "Penelitian Tindakan Kelas"
- "Pengembangan Alat Bantu Ajar"
- "Demonstrasi Model Pembelajaran"

Petunjuk untuk Sekolah: Kegiatan-Kegiatan Sekolah

Kegiatan sekolah yang diusulkan mencakupi unsur-unsur "Kegiatan Program", "Penyediaan Sarana", dan "Rehabilitasi". Sekolah sangat disarankan untuk mengusulkan gabungan dari unsur-unsur tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan sekolah yang tercantum dalam Petunjuk untuk Sekolah:

1) Kurikulum/Proses Belajar-mengajar

- ✓ Kegiatan sekolah untuk meningkatkan minat siswa dan mendorong mereka untuk berprestasi tinggi
- ✓ Kegiatan guru untuk meningkatkan proses belajar-mengajar di dalam kelas
- ✓ Pengembangan bahan ajar
- ✓ Penyediaan buku teks, dan bahan pengajaran/pembelajaran seperti kamus, atlas, kaset pelajaran bahasa, dsb.
- ✓ Penyediaan bahan pembelajaran dan biaya pemeliharannya seperti perangkat laboratorium IPA, tape recorder, OHP, dsb.
- ✓ Kegiatan pelatihan pemanfaatan bahan pembelajaran
- ✓ Kegiatan untuk mendorong belajar siswa seperti karyawisata, lomba-lomba, dan kegiatan penelitian.

2) Sumber Daya Manusia

- ✓ Pengembangan ketrampilan guru mengenai bidang studi dan ketrampilan lain

- ✓ Pengembangan profesional bagi guru dan staf
- ✓ Penelitian tindakan kelas

3) Manajemen Sekolah

- ✓ Kegiatan sekolah untuk meningkatkan penerimaan siswa baru, mengurangi putus sekolah, mengurangi ketidakhadiran siswa, dsb.
- ✓ Kegiatan BP3 untuk mempertinggi kesadaran, motivasi dan keterlibatan orang tua seperti kunjungan rumah dan kelas terbuka untuk orang tua
- ✓ Kegiatan sekolah/BP3 untuk memperkuat hubungan dengan orang tua dan masyarakat sekitar

4) Lingkungan Sekolah/Kelas

- ✓ Penyediaan perabot kelas seperti meja, kursi, rak, papan tulis, dsb.
- ✓ Perbaikan ruang kelas
- ✓ Perbaikan atap
- ✓ Perbaikan atau pembangunan toilet baru

Secara prinsip, kegiatan di bawah ini TIDAK dianjurkan, karena mempertimbangkan tujuan proyek percontohan, besarnya dana REDIP2 atau jadwal waktu proyek:

- ✓ Pembangunan ruang kelas atau laboratorium baru
- ✓ Pembangunan masjid
- ✓ Pembangunan pagar
- ✓ Pembangunan jalan masuk, dan
- ✓ Pembangunan perumahan bagi guru

Dana Pendamping

Sekolah diwajibkan menggali dana pendamping REDIP2. Sumbangan dapat berupa uang atau bukan uang (misalnya bahan bangunan, tenaga kerja, dsb.). Untuk mempermudah pengelolaannya, sumbangan berupa uang saja yang diperhitungkan sebagai dana pendamping. Sumbangan bukan uang harus dicatat tetapi tidak harus diperhitungkan dengan nilai uang. Tidak ada batasan tentang penggalan dana yang lebih besar daripada yang diharuskan. Bahkan, sekolah didorong untuk menggali dana sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak secara berlebihan membebani masyarakat termasuk orang tua murid.

Cara Pemeriksaan Proposal

Dalam Petunjuk untuk TPK dan Sekolah, dinyatakan bahwa "proposal kegiatan pertama kali akan diserahkan kepada TPK. Sesudah diperiksa TPK, proposal itu selanjutnya diperiksa oleh Tim Implementasi Kabupaten (TIK) dan, kemudian, oleh Tim Implementasi Provinsi (TIP) dan Kantor Program Nasional (KPN). Proposal harus diterima KPN selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2002." Tetapi, dalam praktiknya, Tim Implementasi Kabupaten (TIK) tidak ikut serta dalam pemeriksaan proposal karena kurangnya tenaga yang mampu

melaksanakannya. Kantor Program Nasional (KPN) dan Tim Implementasi Provinsi (TIP) melihat fakta ini secara serius, kemudian berusaha memotivasi TIK untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan REDIP2 pada kegiatan berikutnya, yaitu memeriksa laporan keuangan (yang diserahkan oleh TPK dan sekolah). Untuk itu, KPN dan TIP telah memberikan beberapa pelatihan untuk TIK tentang pemeriksaan dan pelaporan keuangan, lokakarya praktis, dsb. Sebagai hasilnya, TIK dapat secara penuh melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang diadakan selama bulan Oktober dan Nopember 2002.

Pemeriksaan proposal berpedoman pada Petunjuk untuk TPK dan Sekolah. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

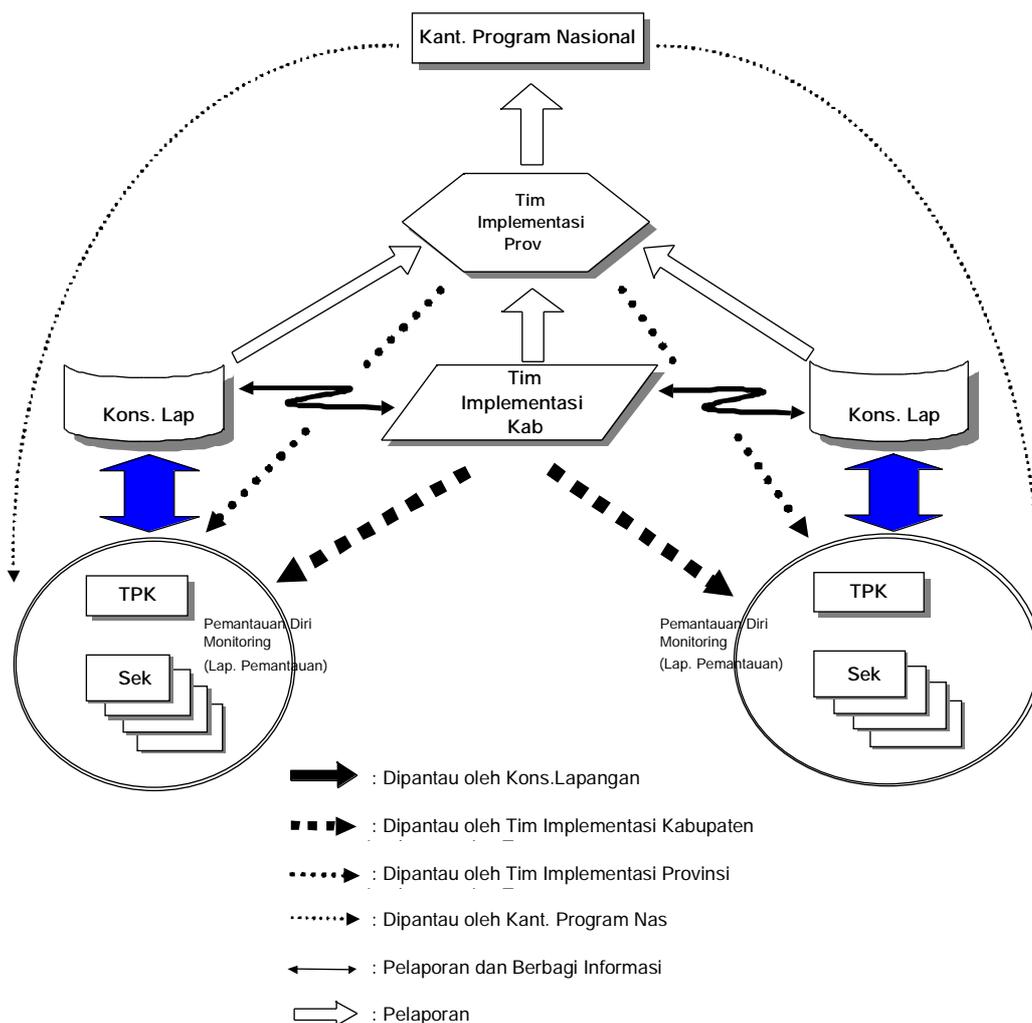
- 1) Pengajuan kegiatan pengadaan atau rehabilitasi saja tidak diperkenankan;
- 2) Pada dasarnya kegiatan pembangunan tidak diperbolehkan;
- 3) Tidak boleh ada pembayaran gaji untuk kepala sekolah, guru dan anggota BP3;
- 4) Dana pendamping harus disediakan;
- 5) Semua kegiatan umum, KKKS dan MGMP harus diusulkan oleh TPK;
- 6) Biaya yang sangat tinggi dan tidak wajar untuk kegiatan pengadaan dan rehabilitasi tidak dapat diterima.

Apabila Konsultan Lapangan, TIP atau KPN menemukan proposal yang salah, mereka mengembalikannya kepada TPK atau sekolah melalui konsultan lapangan. Pada awal Juli 2002, semua proposal TPK dan sekolah disetujui oleh KPN, dan Tim studi JICA mencairkan dana secara langsung ke rekening bank TPK dan Komite Sekolah. Dana yang dicairkan itu adalah keuangan tahap 1, sedangkan pencairan kedua untuk keuangan tahap 2 dilakukan pada bulan Januari 2003.

Bab 6 Proyek Percontohan Tahun Pertama: Pemantauan

Sistem Pemantauan

Sistem Pemantauan untuk proyek percontohan TPK dan sekolah ditunjukkan dalam Gambar 6-1. Hal yang penting adalah bahwa Konsultan lapangan memiliki peran kunci dalam pemantauan, dengan bekerjasama dengan Tim Implementasi Kabupaten (TIK).



Gambar 6-1: Sistem Pemantauan

Temuan-Temuan dari Pemantauan Tahun Pertama

Temuan-temuan utama dari pemantauan pada tahun pertama REDIP2 adalah sebagai berikut:

1) Dana Pendamping

Dana pendamping diwajibkan bagi setiap sekolah yang menerima bantuan REDIP2. Kebanyakan anggota Komite Sekolah REDIP2 bersikap "optimis" dalam penggalian dana, karena mereka telah memiliki pengalaman serupa sebelum REDIP2. Berbagai teknik penggalian dana dapat diamati selama pemantauan.

Kegiatan

- Kantin
- Kue, kalender, dan barang lainnya yang dijual kepada guru dan orang tua murid
- Daur ulang botol minuman oleh siswa dan orang tua murid
- Siswa menyanyi di gereja di Provinsi Sulawesi Utara
- Kegiatan keagamaan
- Alat-alat: amplop, daftar nama, kotak sumbangan di sekolah, dsb.

Uang dan bukan uang (sumbangan tenaga dan bahan bangunan oleh

- Guru
- Orang tua murid dan masyarakat
- Alumni
- Pengusaha lokal
- Yayasan (terutama untuk sekolah swasta)
- Organisasi keagamaan

Tambahan pada SPP sekolah sebagai "sumbangan"

- Misalnya Rp. 1.000/ bulan selama dua bulan ditambahkan pada SPP rutin sekolah

2) Transparansi Sekolah dan Akuntabilitas kepada Publik

Tim studi JICA (selanjutnya disebut Tim) telah mendorong TPK dan sekolah mengumumkan proposal REDIP2 untuk menjamin transparansi kepada masyarakat. Tim menyarankan agar mereka menempelkan proposal di papan pengumuman sekolah, dan menyarankan TPK untuk menempelkan proposal di Cabang Dinas P&K atau kantor Kecamatan). Mereka juga disarankan memasukkan artikel tentang kegiatan REDIP2 di buletin/majalah sekolah atau Kecamatan, sehingga selain anggota Komite dapat mengetahui kegiatan-kegiatan itu dan terdorong untuk ikut serta. Banyak sekolah mengikuti saran ini dan Tim memperkirakan bahwa praktik semacam itu akan mendorong transparansi yang lebih tinggi kepada masyarakat. Transparansi ini sangat penting dalam era otonomi daerah.

3) Prakarsa Pemerintah setempat yang diilhami oleh REDIP2

Beberapa pemerintah daerah yang terlibat dalam REDIP2 ternyata menerapkan prakarsa baru yang diilhami oleh REDIP2, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- Dinas P&K Brebes bermaksud menerapkan kegiatan REDIP2 di kecamatan-kecamatan non-REDIP2. Pada bulan Agustus 2002, DPRD Kabupaten Brebes telah menyetujui untuk mengalokasikan dana sebanyak Rp. 1,6 miliar pada perubahan APBD 2002 untuk peningkatan fisik dan sarana sekolah. Kepala Dinas P & K juga merencanakan untuk menerapkan metodologi REDIP2 dalam pengelolaan

pengembangan sekolah. Program model REDIP ini akan meliputi semua SMP dan MTs, baik negeri maupun swasta, di kabupaten Brebes.

- DPRD Kabupaten Pekalongan menyetujui menyediakan anggaran sebanyak Rp 45 juta dari perubahan anggaran APBD tahun 2002 untuk mendukung kegiatan REDIP2 tahap 1 (Agustus – Oktober 2002). Selain itu, Dinas P&K Pekalongan merencanakan alokasi anggaran pembangunan untuk 7 kecamatan non-REDIP2 (REDIP2 mencakup 9 kecamatan dari 16 kecamatan) dari Tahun Anggaran 2003.
- Karena diilhami oleh kegiatan penggalan dana REDIP2, Camat Tareran, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk sistem peningkatan pendidikan berbasis desa yang disebut "Dewan Pimpinan Desa untuk Pengembangan Pendidikan" dan "Dana Pengembangan Pendidikan Khusus" sebagai lembaga kunci.

4) Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Kegiatan-Kegiatan REDIP2

Selama pemantauan, faktor-faktor kunci di bawah ini diketahui memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implementasi REDIP2 pada tahun pertama.

- "REDIP2 bukan suatu Proyek." – strategi ini memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam REDIP2.
- Pertemuan-pertemuan sosialisasi pendidikan tingkat kecamatan memiliki dampak yang lebih besar.
- Forum Komunikasi SMP - MTs menyediakan sumber daya baru bagi pendidikan.
- REDIP2 dapat meningkatkan komunikasi internal di sekolah.

Bab 7 Proyek Percontohan Tahun Pertama: Hasil dan Dampak

Analisis Kualitatif terhadap Dampak Tahun pertama: Wawancara Kelompok Fokus (*Focus-group Interview*)

Untuk mengukur perubahan dan dampak proyek percontohan REDIP2, diadakan tiga survei sekolah yang komprehensif selama REDIP2: (1) Survei Dasar (*Baseline Survey*) pada tahun 2002, (2) Survei Antara (*Interim Survey*) pada tahun 2003, dan (3) Survei Pasca Percontohan (*Post-Pilot Survey*) pada tahun 2004. Survei-survei ini dirancang dengan cermat untuk mengumpulkan data yang komprehensif untuk dianalisis secara kualitatif, tetapi tampaknya hasil-hasil survei belum memadai untuk menggambarkan perubahan berkelanjutan yang dialami oleh para stakeholder pada tingkat mikro. Karena pertimbangan ini, Tim studi JICA mengadakan (4) wawancara kelompok fokus (*focus-group interview*) yang terdiri atas konsultan lapangan dan kordinator REDIP2 di kantor Dinas P&K Provinsi.

Dalam wawancara kelompok fokus, orang-orang yang berpartisipasi dalam tahun pertama proyek percontohan melaporkan beberapa perubahan yang terjadi dalam hal persepsi dan sikap masyarakat. Mereka melihat telah terjadi peningkatan transparansi, akuntabilitas, kedisiplinan, kejujuran dan motivasi. Hal yang paling penting adalah orang mungkin mempraktikkan demokrasi untuk pertama kalinya. Perubahan pada persepsi pemerintah setempat juga tampak sekali, seperti yang ditandai dengan penggunaan model REDIP dalam pengelolaan pendidikan mereka.

Mengapa REDIP2 Mampu Membawa Perubahan Positif?

Hasil-hasil wawancara kelompok fokus banyak menunjukkan bahwa REDIP2 telah menimbulkan dampak positif terhadap para stakeholder. Mengapa hal ini dapat terjadi? Pada umumnya tanggapan selama wawancara menyatakan bahwa: pertama, REDIP2 telah memberikan model sederhana yang dapat dilaksanakan sehingga dapat dipahami oleh berbagai stakeholder; kedua, model ini telah berhasil membangkitkan interaksi yang sangat dinamis, seringkali bersifat tidak konvensional di kalangan stakeholder; ketiga, tim Konsultan Lapangan, yang dikerahkan untuk mendampingi dan memantau seluruh proses, dengan sungguh-sungguh, secara efektif dan maksimal membimbing peserta REDIP2 dengan sumber daya yang dimilikinya.

Analisis Kuantitatif tentang Dampak Tahun Pertama

Kegiatan percontohan REDIP2 telah dilaksanakan selama dua tahun sejak awal tahun ajaran 2002-2003. Dampak dari kegiatan-kegiatan ini diukur pada waktu yang berbeda selama dan

sesudah dua tahun: evaluasi pra-percontohan (*pre-pilot*) diadakan dari bulan Juli sampai dengan September 2002; evaluasi pertengahan (*mid-term*) dari bulan April sampai dengan Juni 2003; dan evaluasi pasca-percontohan (*post-pilot*) dari Juni sampai dengan Agustus 2004.

Indikator yang diteliti meliputi partisipasi dalam pelatihan, kondisi beberapa fasilitas, dan ketersediaan buku teks. Indikator tersebut secara jelas menunjukkan peningkatan selama satu tahun. Indikator proses seperti kepuasan kepala sekolah, perspektif guru tentang proses belajar-mengajar mereka, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap sekolah juga meningkat. Indikator-indikator ini secara langsung diintervensi oleh REDIP2.

Tetapi, tidak ada perubahan signifikan pada banyak indikator yang dapat diamati antara hasil-hasil survei baseline dan interim, dan beberapa indikator menunjukkan nilai rendah pada skala atau menurun jumlahnya selama satu tahun. Hasil yang tidak konsisten itu disebabkan survei itu menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengkuantifikasikan jawaban dari pertanyaan berbentuk subjektif, dimana responden dianggap menggunakan skala penilaian yang sama secara konsisten untuk menjawab pertanyaan yang sama dalam kedua survei. Tetapi, tampaknya anggapan ini tidak dapat dipertahankan sehingga gambaran yang nyata menjadi terdistorsi atau tidak jelas. Untuk menghindari masalah yang sama dalam survei pasca percontohan, disarankan untuk menambahkan beberapa pertanyaan lagi pada akhir setiap angket, yang menanyakan perubahan responden selama dua tahun.

Evaluasi Menyeluruh terhadap Proyek Percontohan Tahun Pertama

Terdapat banyak pendekatan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan. Apabila melihat hal-hal yang sudah lampau, REDIP sangat unik karena REDIP secara sengaja mengambil pendekatan holistik untuk meningkatkan pendidikan. Pendekatan ini dapat dibandingkan dengan obat-obatan dari negara Timur. REDIP tidak berusaha mengobati "luka" tertentu atau "organ" tertentu. Tetapi, REDIP berusaha menghidupkan "tubuh manusia secara keseluruhan" yaitu pendidikan di masyarakat. Pendekatan holistik merupakan ciri REDIP dan kinerjanya harus dinilai terkait dengan ciri-ciri khasnya tersebut.

Berkaitan dengan pemberdayaan, REDIP2 pada tahun pertama telah berhasil dengan baik. Sebagaimana halnya dengan REDIP1, proyek percontohan berhasil memotivasi orang-orang di sekolah, kantor pemerintah setempat, desa, dan keluarga. Dampak kualitatifnya tampak nyata dipandang dari berbagai sudut. Tetapi, secara kuantitatif, indikator-indikator utama tidak membuktikan pengaruh positif yang signifikan dari proyek percontohan. Memang demikianlah yang dapat secara maksimal dilakukan oleh pendekatan holistik seperti halnya

obat-obatan dari negara Timur yang secara perlahan meningkatkan kondisi menyeluruh dari tubuh manusia. Tidak ada tindakan pembedahan atau penyembuhan yang segera tetapi yang ada adalah pengaturan ulang yang perlahan dan mendasar yang dilakukan terhadap seluruh fungsi tubuh. Apabila tujuan kita adalah demikian, maka REDIP2 telah mencapainya dengan baik sekali.

Berdasarkan evaluasi tahun pertama, tiga tujuan spesifik di bawah ini disarankan untuk tahun kedua REDIP2:

- Dukungan terhadap model REDIP yang diprakarsai Pemerintah
- Dorongan terhadap semangat untuk peningkatan mutu
- Pengembangan REDIP pada tingkat nasional dan provinsi

Bab 8 Mengembangkan Bahan dan Alat Bantu Ajar: Kegiatan Terbaik Proyek Percontohan Tahun Pertama

Mengapa Kegiatan Terbaik?

Proyek percontohan REDIP2 menekankan peningkatan proses belajar-mengajar di sekolah. Banyak TPK (melalui MGMP) dan sekolah berusaha keras untuk mencapai tujuan ini melalui berbagai kegiatan. Salah satu bentuk kegiatan itu adalah mengembangkan sendiri bahan dan alat bantu ajar mereka. Dalam satu tahun, kegiatan mengembangkan sendiri bahan dan alat bantu ajar terjadi di seluruh kecamatan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kreatifitas profesional para guru Indonesia akhirnya muncul setelah lama mengalami penekanan.

Untuk mengukur lingkup dan kedalaman fenomena khusus ini dan untuk mencari pendekatan yang cocok untuk peningkatan mutu, Tim studi JICA mengumpulkan sebanyak mungkin bahan dan alat bantu ajar yang dikembangkan sendiri selama bulan Nopember 2003. Tim dapat mengumpulkan 43 contoh di Jawa Tengah dan 10 di Sulawesi Utara. Kumpulan bahan dan alat bantu ajar ini jelas menunjukkan kreativitas, upaya keras yang dilakukan, dan prestasi tinggi yang dicapai guru. Beberapa di antaranya sudah digunakan secara nasional, sedangkan beberapa lainnya tak lebih dari catatan pribadi pembuatnya saja. Diharapkan kita dapat mengambil banyak pelajaran dan isyarat tentang peningkatan mutu dari tinjauan tentang kegiatan-kegiatan yang terbaik ini.

Gambaran Umum tentang Pengembangan Bahan Ajar selama REDIP2

Meskipun REDIP2 menekankan aspek mutu dalam proyek percontohan, TPK atau sekolah tidak secara spesifik harus melakukan beberapa kegiatan khusus atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan proses belajar-mengajar. Mereka diberi kebebasan untuk menentukan apakah mereka akan mengatasi masalah ini dan langkah apa yang akan mereka ambil. Ternyata banyak dari mereka yang menetapkan kegiatan pengembangan bahan dan alat bantu ajar mereka sendiri yang mereka pandang cocok untuk murid-murid mereka. Wawancara dengan guru yang mengembangkan bahan dan alat bantu ajar atau anggota TPK yang memprakarsai kegiatan ini menunjukkan hasil pengamatan yang menarik. Kita dapat menyimpulkannya dan merumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

1) Mengapa "modul" mereka sendiri?

Sebagian besar bahan-bahan yang dikumpulkan adalah "modul," panduan guru yang terdiri atas susunan topik bahasan, latihan siswa, dan kadang-kadang informasi latar belakang satuan pelajaran. Ini bukan karena panduan bagi guru semacam itu tidak diterbitkan di

Indonesia atau tidak tersedia di daerah itu. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa alasan mengapa banyak guru menyusun modul mereka sendiri:

- Pengganti yang lebih baik untuk buku teks
- Bahan tambahan untuk buku teks dan modul.
- Alternatif yang murah untuk buku teks.
- Kurangnya buku teks atau modul.

2) Siapa yang Menyusun?

Terdapat banyak penyusun bahan ajar: (1) MGMP Kecamatan (di bawah TPK) (kira-kira 50%), (2) kelompok guru dalam satu sekolah (kira-kira 25%), (3) guru secara mandiri (kira-kira 25%). Siapa pun penyusunnya, REDIP2 secara sangat efektif telah merangsang guru melalui bantuan dana serta semangat untuk berinisiatif dan berinovasi.

3) Mata Pelajaran Apa?

Hampir semua mata pelajaran dikembangkan sebagian atau seluruhnya, tetapi Bahasa Inggris, Matematika dan IPA adalah tiga mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa dan guru menganggap bahwa bahan dan alat bantu yang sesuai akan membantu murid menangkap pelajaran secara lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kurikulum dan buku teks untuk ketiga mata pelajaran itu mungkin perlu direvisi atau ditinjau ulang.

Pelajaran untuk Peningkatan Lebih Lanjut

Tinjauan tentang kegiatan-kegiatan terbaik menunjukkan pelajaran-pelajaran berikut ini untuk peningkatan lebih lanjut dalam pengembangan bahan ajar:

- Kerja kelompok lebih baik daripada kerja individual untuk menyusun bahan ajar.
- Peluang untuk kerjasama dan berbagi pendapat mengenai bahan ajar buatan guru sangat penting.
- Peningkatan mutu pendidikan dapat dan sebaiknya dimulai dari guru.

Bab 9 Menuju Proyek Percontohan Tahun Kedua

Tantangan untuk Proyek Percontohan Tahun Kedua

Meskipun banyak sekali kemajuan kualitatif dan dampak terhadap pengembangan pendidikan di kalangan TPK dan sekolah selama tahun pertama REDIP2, masih ada beberapa hambatan selama tahun pertama dan tantangan untuk proyek percontohan tahun kedua. Beberapa faktor harus lebih diperhatikan, ditingkatkan dan diperkuat pada tingkat sekolah, TPK dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah rangkuman tentang hambatan pada tahun pertama dan tantangan yang harus dihadapi REDIP2 pada tahun kedua.

1) Peran Pemerintah Kabupaten

Sejak kegiatan proyek percontohan REDIP2 dimulai pada bulan Juli 2002, Tim Studi, Team Implementasi Provinsi (TIP) dan Konsultan Lapangan telah bekerja keras untuk melobi pemerintah kabupaten/kota dan Dinas P&K untuk menyatakan komitmen mereka terhadap REDIP2, khususnya dukungan keuangan dari pemerintah daerah dan bantuan teknis dari Dinas P&K. Pemerintah Kabupaten Brebes, Pekalongan, Minahasa dan Kota Bitung telah menyatakan dukungan keuangan terhadap TPK dan sekolah dalam REDIP2. Sebagai realisasinya, terhitung dari Juni 2003, pemerintah kabupaten Brebes dan kota Bitung telah merealisasikan dukungan keuangan untuk TPK dan sekolah, tetapi pemerintah kabupaten Pekalongan dan Minahasa sayangnya belum merealisasikan dukungan keuangan selama tahun 2002/2003. Tim studi JICA, Team Implementasi Provinsi (TIP), Tim Implementasi Kabupaten (TIK) dan konsultan lapangan memahami bahwa diperlukan lobi terus menerus supaya pemerintah menyadari pentingnya pengembangan pendidikan sampai pada akhirnya berhasil menerima dukungan keuangan dari pemerintah daerah.

Selain dukungan keuangan, perlu ada komitmen yang tinggi dari setiap jajaran birokrasi dalam Pemerintah Kabupaten terutama mereka yang terkait langsung dengan teknis pelaksanaan program REDIP, yaitu Kepala Dinas, Kasubdinmen, Kasi SLTP, Kepala Cabang Dinas, dan pengawas sekolah.

2) Peran TPK

Meskipun TPK sudah banyak sekali berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan pada tahun sebelumnya, masih ada beberapa TPK yang belum memahami peran penting mereka. TPK dapat memiliki banyak fungsi dan pengaruh dalam pengembangan pendidikan. Banyak kegiatan TPK tahun sebelumnya membuktikan hal ini. Supaya TPK berfungsi secara efektif, TPK harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Semua anggota TPK harus memahami tujuan mereka dan apa yang akan mereka capai sesudah satu tahun. Tanpa ini, kegiatan mereka

hanya akan berupa kegiatan yang bersifat *ad hoc* saja atau mereka hanya akan melakukan kegiatan konvensional saja yang ditiru dari proyek lama. Selain itu, perlu peningkatan koordinasi di antara pengurus TPK yang pada beberapa tempat masih dirasa kurang. Hal ini penting karena program-program TPK diharapkan lebih membumi dan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan KKKS, jika mereka secara serius memikirkan peran mereka, kegiatan mereka tidak hanya berupa pertemuan sekali atau dua kali dalam beberapa bulan saja. Konsultan Lapangan perlu menekankan pentingnya menetapkan visi dan sasaran yang jelas bagi KKKS dan memfasilitasi mereka lebih banyak lagi pada tahun kedua. Untuk memperkuat MGMP, Tim studi JICA dan tim implementasi Provinsi merancang program yang menghubungkan sumber daya dari universitas setempat melalui program IMSTEP dan pelatihan guru melalui MGMP REDIP2. Program ini disebut Penelitian Tindakan Partisipasi dalam Proses Belajar-Mengajar (*Participatory Action Research in Teaching dan Learning Process*), dan tim peneliti akan melakukan penelitiannya di MGMP dan sekolah-sekolah REDIP2.

3) Komitmen Sekolah

REDIP2 terbukti menjadi sarana yang kuat untuk pengembangan sekolah. Proyek percontohan REDIP2 memotivasi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua murid dan masyarakat, dan menciptakan banyak kesempatan agar semua stakeholder dapat berpartisipasi. Proyek ini juga melatih mereka secara teknis seperti bagaimana cara menulis proposal yang baik, bagaimana cara melaksanakan kegiatan secara lancar efisien, transparan, dan akuntabel, bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat, bagaimana mengelola anggaran, bagaimana menulis laporan keuangan, dsb. Tetapi, masih ada sekolah yang belum tahu tentang manajemen berbasis sekolah dan tetap menggunakan gaya lama dimana kepala sekolah memiliki keistimewaan untuk mengurus proyek. Sikap mereka selalu pasif dan tidak demokratis. Ada juga sekolah yang proposalnya belum memiliki visi, tujuan, atau prioritas yang jelas. Kegiatan-kegiatan sekolah itu cenderung bersifat insidental, dan biasanya transparansi di sekolah-sekolah ini sangat rendah. Ada juga sejumlah sekolah yang kepala sekolah dan gurunya hanya memperhatikan siswa mereka yang ada di sekolah, sehingga tidak memperhatikan siswa yang drop-out atau anak-anak putus sekolah. Bagi sekolah-sekolah ini, Konsultan Lapangan harus memberi pendampingan yang lebih intensif, tim implementasi kabupaten/kota dan provinsi harus memberikan saran dari sudut pandang Dinas P&K, dan Tim studi JICA harus memberikan lebih banyak bantuan teknis.

Garis Besar Proyek Percontohan Tahun Kedua

Proyek percontohan REDIP2 untuk tahun kedua dilaksanakan dari bulan Oktober 2003 sampai dengan Juni 2004. Ada beberapa penyesuaian dan peningkatan pada tahun kedua berdasarkan hasil-hasil tahun pertama, sebagai berikut:

- Tahap keuangan pada tahun kedua disatukan, tidak dua tahap seperti pada tahun pertama. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk mengurangi pekerjaan administrasi bagi TPK dan sekolah.
- Komite Sekolah REDIP2 diintegrasikan dengan '*Komite Sekolah*' yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri.
- Jumlah dana JICA yang diberikan kepada TPK dan sekolah dikurangi kira-kira 20% karena JICA mempertimbangkan kesinambungan REDIP2 sesudah berakhirnya proyek percontohan, dan JICA juga mengakui bahwa pemerintah kabupaten dan kota yang terlibat dalam REDIP2 sudah mulai menyediakan dana pendamping untuk sekolah-sekolah REDIP2.

Salah satu kemajuan menonjol selama tahun kedua adalah kebanyakan transparansi TPK dan sekolah sudah meningkat. Banyak TPK dan sekolah secara sukarela menempelkan proposal dan laporan keuangan mereka di papan pengumuman pada tahun pertama untuk menunjukkan transparansi. Supaya gerakan ini menjadi hal yang rutin untuk semua TPK dan sekolah, Kantor Program Nasional meminta mereka semua untuk menempelkan proposal dan laporan keuangan mereka di papan pengumuman. Kemajuan lainnya adalah Kabupaten Brebes dan Kota Bitung telah menyediakan dana pendamping untuk TPK dan sekolah REDIP2 pada tahun 2002/2003. Dua kabupaten lainnya juga telah merencanakan menyediakan dana pendamping pada tahun 2003/2004, dan sebagian dari dana itu sudah diberikan kepada sekolah-sekolah.

Prosedur dan Alokasi Anggaran

Prosedur dan cara pengalokasian anggaran pada tahun kedua pada dasarnya sama dengan tahun pertama. Tetapi, ada satu perubahan penting dibandingkan tahun pertama. Yaitu pengelolaan proposal. Pada tahun pertama, semua proposal diperiksa dan disetujui Tim Implementasi Provinsi (TIP) dan anggota Tim studi JICA. Tetapi, pada tahun kedua, semua proposal secara cermat diperiksa dan disetujui oleh Tim Implementasi Kabupaten/Kota (TIK) dan TIP. Tim studi JICA tidak terlibat dalam masalah ini, dan Tim studi JICA puas dengan hasilnya. Ini menunjukkan inisiatif dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Dapat dikatakan juga bahwa Dinas P&K kabupaten dan provinsi pada dasarnya mampu mengurus proyek percontohan karena proses pemeriksaan dan pengesahan proposal merupakan salah satu tugas yang paling sulit dalam proyek percontohan.

Program Pertukaran pada Tahun Pertama

Pada tahun pertama REDIP2, program pertukaran antara Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Utara diadakan pada tanggal 7 – 9 April 2003 untuk kunjungan ke Jawa Tengah oleh rombongan Sulawesi Utara dan pada tanggal 14 – 16 April 2003 untuk kunjungan ke Sulawesi Utara oleh rombongan Jawa Tengah. Selama program pertukaran di Jawa Tengah, rombongan mengunjungi 12 kecamatan (7 di Brebes dan 5 di Pekalongan) dari 19 kecamatan yang terlibat dalam REDIP 2 (10 di Brebes dan 9 di Pekalongan). Di Sulawesi Utara, 9 kecamatan dikunjungi (4 di Bitung dan 5 di Minahasa) dari 14 kecamatan (4 di Bitung dan 10 di Minahasa).

Berdasarkan pengamatan terhadap program pertukaran pada tahun pertama, dapat diambil beberapa pelajaran berikut ini:

- Sebaiknya peserta program pertukaran mewakili semua komponen anggota yang terlibat dalam REDIP2 di daerah itu, termasuk wakil-wakil pemerintah daerah dan DPRD, TPK, kepala sekolah dan guru, Tim Implementasi Provinsi/Kabupaten, dan Konsultan Lapangan. Program pertukaran ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk berbagai ide dan pendapat mereka dan memantapkan komitmen yang lebih besar terhadap REDIP2.
- Dalam pelaksanaan program pertukaran, kunjungan tidak dapat dilakukan ke semua sekolah di Jawa Tengah yang sudah diprogramkan dan kesempatan berdiskusi tidak cukup untuk di Sulawesi Utara. Hal ini karena besarnya jumlah rombongan dan jarak yang jauh antara sekolah yang harus dikunjungi. Dalam program pertukaran yang akan datang, jumlah rombongan, pengelompokan, dan kunjungan ke lokasi harus dipertimbangkan secara lebih cermat agar koordinasi yang lebih baik dapat dilakukan. Program kunjungan ke sekolah dan TPK hendaknya tidak dilakukan dalam rombongan besar (dalam bus besar) tetapi dibagi menjadi kelompok kecil (antara 10 s/d 15 orang). Ini dimaksudkan agar kunjungan dapat dilakukan secara lebih intensif, dapat menyebar ke banyak sekolah dan TPK, dan tidak membebani sekolah dan TPK yang dikunjungi.
- Lokakarya seharusnya dilaksanakan pada akhir kunjungan, tetapi tidak diadakan di Jawa Tengah atau Sulawesi Utara. Oleh karena itu, sesudah selesainya kunjungan lapangan, tidak diadakan diskusi tentang apa yang telah dilihat dan dipelajari oleh peserta. Lokakarya sebaiknya diatur sebagai salah satu prioritas dari program pertukaran karena diharapkan dalam lokakarya itu para peserta dapat berbagi tentang pandangan dan pemikiran mereka secara lebih intensif.

Pelatihan Selama REDIP2 (Interim Training)

Menyusul pelatihan pra-percontohan pada paruh pertama tahun 2002, pelatihan-pelatihan diadakan selama masa implementasi proyek percontohan. Tiga macam pelatihan dan satu lokakarya diprogramkan sebagai pelatihan selama proyek percontohan: (1) Pelatihan 3-hari bagi Kepala Sekolah pada bulan April/Mei 2003, (2) Pelatihan 1 hari bagi Guru pada bulan Mei 2003 dan (3) Lokakarya pada bulan Juni/Juli 2003. Pelatihan bagi kepala sekolah dan guru baru diprogramkan sebagai pelatihan interim untuk meningkatkan kapasitas profesional mereka mengenai manajemen sekolah dan kegiatan belajar-mengajar di kelas, sedangkan lokakarya dimaksudkan untuk menyegarkan pemahaman peserta tentang penulisan proposal dan implementasi kegiatan REDIP2.

Bab 10 Proyek Percontohan Tahun Kedua: Pemantauan

Temuan dari Pemantauan pada Tahun Kedua

Ada tiga tahap kunjungan pemantauan oleh anggota Tim Studi JICA selama tahun kedua: (1) Oktober 2003, (2) Februari-April 2004, dan (3) Juli-Agustus 2004, selain pemantauan rutin oleh Konsultan Lapangan. Berikut ini adalah temuan-temuan pokok dari kunjungan pemantauan tersebut:

1) Pemahaman yang Lebih baik tentang Sistem REDIP2: Peningkatan Mutu dan Transparansi

Kepala Sekolah, guru dan anggota TPK menunjukkan pemahaman lebih baik tentang sistem REDIP2 selama pemantauan pada bulan Februari-April 2004, dibandingkan dengan pemantauan pada bulan April-Mei 2003. Banyak kepala sekolah menegaskan bahwa REDIP2 tidak sekedar memberikan dana hibah (block grant) kepada sekolah, tetapi meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kerjasama dengan banyak stakeholder. Banyak kepala sekolah menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan upaya keras untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan membeli peralatan sekolah dan alat bantu ajar terutama MTs, sekolah terpencil dan unit sekolah baru.

Banyak kepala sekolah dan konsultan lapangan juga menyatakan bahwa unsur paling baik dari sistem REDIP2 adalah "transparansi". Hampir semua sekolah mempraktekkannya dengan memasang proposal dan laporan keuangan REDIP2 di papan pengumuman/majalah sekolah, jadi sangat kecil kemungkinannya kepala sekolah menyalahgunakan dana REDIP2, yang sayangnya masih menjadi barang langka di dalam konteks Indonesia.

2) Dana Pendamping

Melalui REDIP2, banyak sekolah mengembangkan cara-cara inovatif untuk mengumpulkan dana pendamping. Khususnya banyak MTs dan sekolah swasta, yang umumnya dianggap sebagai sekolah yang tidak memiliki fasilitas dibandingkan dengan sekolah negeri, telah menunjukkan keberhasilan dalam menggali dana pendamping. Dilaporkan bahwa dana pendamping dikumpulkan melalui dana sukarela murni, tanpa paksaan. Banyak kepala sekolah mengatakan bahwa jika kegiatan sosialisasi kepada orang tua murid dan masyarakat berhasil, dan orang tua murid dan masyarakat melihat bahwa sekolah dikelola dengan baik dan tidak ada penyelewengan dana berkat adanya transparansi dalam sistem akuntansi sekolah, akan mudah untuk mengumpulkan dana pendamping dari orang tua murid dan masyarakat.

3) Siswa Putus Sekolah dan Anak-Anak Tak Bersekolah

Meskipun angka putus sekolah menurun pada sebagian besar sekolah-sekolah REDIP2 dan angka pendaftaran siswa baru meningkat di kecamatan-kecamatan REDIP2, banyak kepala sekolah mengakui bahwa masalah putus sekolah dan anak-anak yang tidak bersekolah merupakan masalah rumit yang tidak dapat dipecahkan oleh sekolah dan Cabang Dinas P&K secara sendirian. Penyebab utama anak putus sekolah adalah rendahnya kesadaran tentang pentingnya wajib belajar, rendahnya status sosial ekonomi orang tua murid, dan perkawinan dini, serta adanya peluang kerja bagi anak-anak di lingkungannya. Meskipun kegiatan sosialisasi dalam REDIP2 telah meningkatkan kesadaran tentang pendidikan di kalangan orang tua, tetapi masalah-masalah ekonomi orang tua murid sulit untuk dipecahkan.

4) Dampak terhadap Proses belajar-mengajar

Perubahan terbesar yang dapat dilihat di sekolah sejak pemantauan terakhir selama bulan April-Mei 2003 adalah peningkatan dalam proses belajar-mengajar. Banyak sekolah REDIP2 sekarang melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang rencananya digunakan pada tahun ajaran berikutnya yang dimulai bulan Juli 2004, dan banyak guru sudah mencobakan metode pembelajaran aktif seperti pembelajaran kontekstual (CTL) dan penilaian autentik di kelas mereka, yang menggunakan "kegiatan praktis" oleh kelompok siswa untuk mempermudah siswa "belajar melalui bekerja (learning by doing)".

5) Persiapan Ujian Nasional

Mulai tahun ajaran baru ini, Depdiknas mewajibkan siswa mencapai nilai lebih dari 4.1 dari skala 10 untuk dapat lulus ujian akhir nasional (UANAS), meningkat dari 3.1 tahun sebelumnya, dan jumlah mata pelajaran dalam UANAS sekarang dikurangi menjadi tiga saja: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Sekolah percontohan REDIP2 memberikan pembelajaran tambahan agar siswa lebih siap untuk mengikuti UANAS:

- Kelas pengayaan
- Forum diskusi kelas
- Kelompok Belajar di Rumah
- Kampanye Jam Belajar

6) Kestinambungan sesudah REDIP2

Ketika ditanya tentang kesinambungan sistem dan kegiatan REDIP2 sesudah REDIP2, kebanyakan kepala sekolah dan anggota TPK bersikap optimis dan menyatakan kepada kami bahwa mereka pasti meneruskan sistem dan kegiatan REDIP2 atas prakarsa mereka sendiri, meskipun skalanya lebih kecil. Mereka menekankan bahwa REDIP2 dapat dilanjutkan karena REDIP2 membentuk "sistem kerjasama" di antara berbagai stakeholder:

- Kerjasama di dalam sekolah
- Kerjasama antara SMP dan MTs, serta antara sekolah negeri dan sekolah swasta melalui TPK, KKKS dan MGMP

- Kerjasama antara sekolah dan masyarakat melalui Komite Sekolah
- Kerjasama antara pendidikan dan sektor lainnya
- Kerjasama antara sekolah dan Dinas P&K di Kabupaten dan Kecamatan melalui TPK

Program Pertukaran pada Tahun Kedua

Program pertukaran kedua selama REDIP2 bertujuan saling bertukar pengetahuan dan teknik yang dikembangkan dan dilaksanakan dalam kegiatan REDIP. Meskipun program pertukaran pertama pada tahun 2003 dirancang untuk mempertukarkan para stakeholder REDIP2 terutama antara dua provinsi (Sulawesi Utara dan Jawa Tengah), program pertukaran kedua pada tahun 2004 diorganisasi ke dalam model yang lebih beragam. Di Jawa Tengah, ada kegiatan intra-kabupaten dan antar-kabupaten untuk bertukar dan mendiseminasikan hasil-hasil REDIP2 antara daerah REDIP2 dan Non-REDIP. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Utara pada dasarnya mempertahankan kegiatan antar provinsi. Tetapi, mereka mengadakan kunjungan diseminasi di daerah Non-REDIP, dengan mengunjungi semua kabupaten di dalam provinsi. Salah satu hasil dari program pertukaran intra dan antar kecamatan REDIP dan non REDIP di Jawa Tengah adalah tersusunnya Buku Informasi REDIP2, yang isinya menggambarkan pelaksanaan dan dampak yang diperoleh dari program REDIP2 di Jawa Tengah.

Lomba Bahan Ajar

Pada bulan Juli-Agustus 2004, Tim studi JICA mendukung "Lomba Bahan Ajar" yang diadakan oleh Dinas P&K kabupaten/provinsi. Lomba ini difokuskan pada hasil-hasil MGMP, dan bertujuan mendiseminasikan kegiatan/bahan/produk MGMP kepada MGMP di kecamatan lain. Lomba ini terdiri atas dua tahap: seleksi pendahuluan di tingkat kecamatan dan lomba utama di tingkat kabupaten. Pada seleksi pendahuluan, setiap MGMP di kecamatan memilih bahan-bahan pameran yang kemudian dilombakan di tingkat kabupaten. Di Sulawesi Utara, tidak banyak bahan ajar yang dikembangkan, maka lomba bahan ajar diganti dengan lomba silabus untuk Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), karena banyak guru mengeluh bahwa silabus lama tidak sesuai dengan KBK.

Delegasi NIPDEP dari Malawi

Pada bulan Juni 2004, REDIP2 menerima delegasi NIPDEP (National Implementation Program for District Education Plan) dari Malawi. Seperti REDIP2, NIPDEP juga mendapat bantuan dari JICA. Delegasi NIPDEP, terdiri atas 7 anggota (termasuk satu orang anggota Tim studi JICA), mengunjungi sekolah-sekolah di Jawa Tengah, menghadiri undangan Bupati, mewawancarai kepala Dinas P&K Kab. Brebes dan Pekalongan, dan mendiskusikan mekanisme REDIP2 dengan anggota REDIP2.

Bab 11 Kerjasama dengan IMSTEP

REDIP2 Research Grant (RRG)

Pada tahun 2003/2004, REDIP2 memprakarsai hibah penelitian (REDIP2 Research Grant, RRG) sebagai sarana untuk bekerjasama dengan program pendidikan lain di Indonesia yang dibantu JICA, yaitu IMSTEP (Improvement of Mathematics and Science Teacher's Education Project). Kerjasama itu bertujuan saling bertukar mengenai hasil dan pelajaran yang diambil dari masing-masing proyek. Sejak bulan Juli 1998, IMSTEP meningkatkan pelatihan guru Matematika dan IPA di tiga universitas yang menyelenggarakan pendidikan keguruan, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Malang (UM).

Mengapa Bekerjasama dengan IMSTEP?

Dalam REDIP2, salah satu kegiatan yang penting adalah MGMP tempat guru-guru mata pelajaran bertemu setiap bulan dan berdiskusi, mengundang narasumber, mengadakan demonstrasi pembelajaran baru, dan membuat bahan ajar untuk meningkatkan ketrampilan mengajar. Pada umumnya, MGMP telah berfungsi dengan baik di kebanyakan kecamatan, untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi guru, tetapi ada MGMP yang tidak dipersiapkan dan diorganisasi dengan baik. Hal ini karena anggota MGMP, guru SMP dan MTs, tidak memiliki pengalaman memadai untuk mengorganisasi MGMP pada tingkat kecamatan, dan biasanya tidak ada narasumber untuk pelatihan guru atau penasehat profesional yang tersedia di daerah itu. Setelah menemukan masalah-masalah tersebut, tim JICA menyadari bahwa diperlukan upaya untuk menghadirkan narasumber luar untuk kegiatan MGMP dalam REDIP2, dan IMSTEP memiliki sumber daya yang tepat untuk MGMP.

Tim JICA memperkirakan kemungkinan penerapan hasil-hasil IMSTEP (misalnya, modul, metode mengajar, metodologi riset, dsb) untuk MGMP REDIP, dan mempertimbangkan strategi untuk memperkenalkan, menerapkan, dan melokalisir pengetahuan dan teknik IMSTEP ke/oleh REDIP2. Hasilnya, diputuskan untuk melibatkan universitas LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) terdekat dengan daerah REDIP2 dan untuk memobilisasikan mereka sebagai agen perubahan. Para dosen universitas ini diharapkan belajar tentang pengetahuan dan teknik IMSTEP, dan mengujicobakan serta menerapkannya ke dalam kegiatan MGMP di REDIP2.

Organisasi RRG

Kerjasama dilakukan dalam bentuk penelitian hibah yang disediakan oleh tim JICA. Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Provinsi Sulawesi Utara dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Provinsi Jawa Tengah diberi kesempatan untuk mengajukan proposal untuk penelitian hibah tersebut. Penelitian itu dimaksudkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan MGMP REDIP2 dengan menerapkan pengetahuan dan teknik dari IMSTEP. Kegiatan penelitian meliputi penilaian situasi pengajaran sekarang di dalam kelas, penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya di kelas di beberapa sekolah yang telah dipilih. REDIP2 menyebut kegiatan ini dengan "Penelitian Tindakan Kelas".

Hasil-Hasil RRG

Penelitian tindakan kelas di dua provinsi menunjukkan hasil yang positif, meskipun periode implementasinya agak pendek. Salah satu faktor utama keberhasilan penelitian ini adalah sumber daya IMSTEP tersedia kapan saja dibutuhkan. Dua kunjungan tim RRG ke lokasi IMSTEP memberi mereka banyak pengetahuan, bahan dan teknik untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas, dan pertemuan rutin antara IMSTEP dan RRG memberi masukan tentang saran-saran kepada tim RRG.

Dari hasil ini, kerjasama berikutnya dengan IMSTEP dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan jika model REDIP diperluas ke kabupaten lain tempat MGMP REDIP dibentuk dan apabila ada permintaan terhadap bahan, teknik, dan metode mengajar bagi MGMP baru. Hal yang penting dari kerjasama itu adalah penentuan waktu mengundang IMSTEP. Menurut pengalaman MGMP REDIP2, diperlukan saat yang tepat sehingga MGMP dapat menerima jenis bantuan IMSTEP, karena MGMP pada dasarnya memerlukan waktu untuk mengembangkan sistem organisasinya: dengan melakukan analisis masalah, atau dengan bertukar bahan dan metode mengajar di kalangan anggota. Melalui proses ini, guru dapat secara jelas mengidentifikasi kelemahan mereka dalam mengajar. Kemudian, saat itulah yang tepat untuk mulai bekerjasama dengan IMSTEP.

Bab 12 Proyek Percontohan Tahun Kedua: Hasil dan Dampak

Analisis Kualitatif Dampak Tahun Kedua

Tim studi JICA mewawancarai berbagai stakeholder dan mengumpulkan fakta-fakta tentang perubahan kualitatif dan dampak proyek percontohan tahun kedua. Tim secara hati-hati meneliti hasil wawancara dan membandingkannya dengan tahun pertama, dan menemukan bahwa kebanyakan perubahan dan dampak pada tahun kedua sangat mirip dengan tahun pertama. Perubahan ini merupakan proses yang berkelanjutan dan banyak dari perubahan itu telah menjadi bagian dari pengembangan pendidikan. Ada beberapa perubahan dan dampak yang perlu diperhatikan pada tahun kedua sebagai berikut.

1) Perluasan Model REDIP oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2004

Pada tahun 2004, Dinas P&K Kabupaten Pekalongan dan Brebes di Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program perluasan REDIP dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten untuk menerapkan sistem REDIP di sekolah-sekolah yang belum disentuh oleh REDIP2.

Di Kabupaten Pekalongan, Dinas P&K mengalokasikan Rp. 160 juta dari anggaran APBD untuk program perluasan REDIP mereka sendiri, yang bertujuan memperluas sistem REDIP ke semua sekolah menengah pertama di kabupaten, sebanyak 22 sekolah di 7 kecamatan. Dinas P&K Pekalongan berjanji untuk menyediakan dana sebanyak Rp. 3,5 hingga 5 juta untuk setiap TPK dan Rp. 6 juta untuk setiap Komite Sekolah sebagai bantuan bagi kegiatan yang diusulkan dan dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Agustus 2004.

Di Kabupaten Brebes, Dinas P&K mengembangkan rencana yang sangat ambisius yang bertujuan memperluas pendekatan REDIP kepada semua sekolah negeri di kabupaten, dari tingkat pendidikan prasekolah sampai dengan tingkat menengah atas, dengan menggunakan anggaran BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) dari APBD tahun 2004. Total jumlah sekolah sasaran untuk program perluasan REDIP tahun 2004 adalah 976. Kepala Dinas P&K juga mengungkapkan rencana panjangnya yang ambisius yaitu memperluas pendekatan REDIP kepada semua (sebanyak 1.557) sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Brebes, tidak hanya sekolah di bawah Dinas P&K saja tetapi juga mencakup Madrasah di bawah Departemen Agama, pada tahun 2005.

2) Perluasan Model REDIP oleh Depdiknas: DBEP dan REDIP-G

Sesudah otonomi daerah, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengeluarkan strategi pengembangan pendidikan dasar yang baru. Isi pokoknya adalah; (1) Manajemen Berbasis Sekolah, (2) Partisipasi Masyarakat dan (3) Desentralisasi Pendidikan. Sejak

otonomi, kewenangan, penentuan anggaran, dan peran pemerintah pusat dan daerah banyak sekali berubah, dan Depdiknas sedang mencari model pengembangan pendidikan dasar yang baru yang sesuai dengan era otonomi. Melihat keadaan ini, REDIP2 menunjukkan contoh yang sangat jelas dan kongkrit tentang bagaimana melaksanakan manajemen berbasis sekolah, untuk melibatkan masyarakat, dan untuk membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan era otonomi. Teori dan bukti yang berhasil dari REDIP2 cukup kuat untuk mempengaruhi Depdiknas untuk menerapkan model REDIP dalam program mereka sendiri.

Upaya pertama Depdiknas untuk menerapkan Model REDIP dapat dilihat dalam proyek dana pinjaman, Decentralized Basic Education Project (DBEP) yang didanai oleh Asian Development Bank. Dalam DBEP, mereka menyelipkan sistem TPK REDIP ke dalam struktur proyek mereka, dan pembangunan kelas baru dilaksanakan dengan sistem block grant melalui pengajuan proposal. Ide ini pada mulanya dikembangkan oleh REDIP. Depdiknas sekarang sedang merencanakan program pengembangan pendidikan untuk sekolah menengah, yang disebut dengan REDIP-Government of Indonesia (REDIP-G) – REDIP-Pemerintah Indonesia. Rencananya adalah menerapkan model REDIP dengan sumber daya manusia dan keuangan pemerintah sendiri. Program ini masih dieksperimenkan, dan daerah sasarannya adalah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Satuan Tugas REDIP-G telah mulai merancang kerangka program, dan meminta JICA untuk memberikan bantuan teknis.

Analisis Kuantitatif Dampak Tahun Kedua

Survei pasca percontohan dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2004. Dari analisis survei pasca percontohan, kita dapat menyimpulkan bahwa REDIP telah memberikan dampak yang positif dan mantap terhadap orang-orang yang terlibat dalam pendidikan di daerah percontohan. Dampaknya sangat luas dan berwawasan jauh, tidak terbatas pada satu atau dua aspek pendidikan. Dalam meringkas temuan-temuan itu, kami kemukakan tiga ciri-ciri dampak REDIP:

- 1) ***Dampak REDIP dirasakan oleh orang-orang yang berbeda-beda.*** Tidak hanya kepala sekolah dan guru tetapi orang tua murid, anggota masyarakat dan pejabat pemerintah juga sedikit banyak berubah berkat kegiatan REDIP. Siswa, sebagai sasaran akhir dari kegiatan REDIP, tidak dikecualikan; prestasi mereka juga meningkat.
- 2) ***Dampak REDIP itu komprehensif.*** REDIP bukanlah program bertujuan tunggal yang dimaksudkan hanya untuk satu sasaran tertentu saja. Tetapi, REDIP menyediakan kerangka yang lebih luwes yaitu apa pun dapat dicapai asalkan mengikuti Petunjuk

yang ditetapkan sebelumnya. Kegiatan-kegiatannya berbeda dari satu sekolah dengan sekolah lainnya, dari TPK dengan TPK lainnya, yang secara langsung mencerminkan kebutuhan dan aspirasi langsung dari masyarakat. Dengan demikian, dampaknya menjadi komprehensif dan mendalam.

- 3) ***Dampak REDIP itu mencapai tujuan akhir, peningkatan mutu pendidikan.*** Meskipun REDIP tidak mewajibkan orang untuk mengambil tindakan eksplisit terhadap mutu peningkatan, orang-orang secara spontan berusaha keras untuk mencapainya. Contohnya adalah guru-guru yang terlibat dalam MGMP berbasis kecamatan yang dibentuk selama REDIP. Karena termotivasi dan diberdayakan oleh MGMP model baru, banyak dari mereka secara bersemangat meningkatkan ketrampilan mengajar mereka, menciptakan bahan dan alat bantu ajar, dan yang paling penting kebanyakan mereka menerapkan ketrampilan dan pengetahuan baru itu di kelas mereka. Inovasi di kelas segera dapat terlihat dan disambut dengan baik oleh siswa mereka. Anekdote ini menegaskan satu diktum: peningkatan mutu harus dimulai dari "dalam" guru, tidak dari atas ke bawah atau dari luar ke dalam. Hasil-hasil survei menunjukkan bahwa peningkatan mutu yang nyata semacam itu secara diam-diam sedang terjadi di hampir semua sekolah di bawah REDIP2.

REDIP2 telah memberikan alat dan kesempatan bagi guru dan kepala sekolah untuk mempertajam komitmen mereka dan merasakan kepuasan lebih banyak dari profesi mereka yang mulia. REDIP telah menghilangkan hambatan psikologis antara sekolah dan masyarakat, memperdekat stakeholder lokal dan mengajak mereka untuk bekerjasama. Hasil-hasil survei dan analisisnya telah menunjukkan bahwa pengaruh positif REDIP baru saja mulai muncul.

Bab 13 REDIP dan Desentralisasi Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan

REDIP2 telah mengembangkan pola pengembangan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memainkan peran yang lebih aktif. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota akan mampu mengambil alih REDIP2 baik dari segi administrasi maupun segi keuangan. Dengan pertimbangan semacam itu, Tim studi JICA membentuk Tim Implementasi Provinsi (TIP) dan Tim Implementasi Kabupaten/Kota (TIK) sejak awal REDIP2. REDIP2 telah memberikan berbagai pelatihan kepada pejabat yang dipilih sebagai anggota TIK, dan telah menugasi mereka dengan beberapa peran penting; menjadi penyaji makalah dalam kampanye pendidikan, pemeriksa proposal TPK dan sekolah, memantau kegiatan proyek percontohan, memeriksa laporan keuangan TPK dan sekolah, dan lain-lain. Tim studi JICA juga telah mengadakan pendekatan tidak hanya kepada Dinas P&K Kabupaten/Kota, tetapi juga bupati/walikota, anggota DPRD untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap pengembangan pendidikan. REDIP2 juga mengundang bupati/walikota dan anggota DPRD ke lokasi proyek percontohan dan menjelaskan bagaimana pengembangan pendidikan dari bawah (bottom-up) dapat berjalan dengan baik dalam REDIP2.

Pemerintah kabupaten/kota dan Dinas P&K yang menjadi wilayah REDIP2 sudah mulai memberikan peran yang lebih aktif baik dalam urusan administratif maupun pendanaan. Mereka juga telah memiliki TIK serta menyediakan biaya operasional. Hal ini terjadi karena mereka telah yakin bahwa pola baru pengembangan pendidikan melalui partisipasi masyarakat ternyata efektif. Hal yang lebih menggembirakan terjadi di tiga kabupaten (Brebes, Pekalongan dan Minahasa Selatan), yaitu mereka merasa yakin bahwa REDIP2 terbukti sangat efektif. Oleh karena itu, ketiga kabupaten tersebut telah memutuskan untuk melanjutkan dan memperluas kegiatan REDIP2 ke kecamatan non REDIP. Perluasan ini sepenuhnya dibiayai dengan dana APBD kabupaten.

Sejak 2003, Kabupaten Brebes dan Pekalongan tidak hanya meningkatkan anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan tetapi juga menerapkan model REDIP untuk pengembangan pendidikan mereka sendiri. Kota Bitung juga menanggapi dengan baik sejak permulaan REDIP2 dengan menyediakan anggaran pendamping untuk TPK dan sekolah.

Pada tahun 2004, Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan juga telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pendidikan dengan menerapkan teknik REDIP2. Perlu dicatat bahwa Kabupaten Minahasa Selatan, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Minahasa dan baru saja terbentuk pada tahun 2003, juga merencanakan melaksanakan model REDIP.

BAGIAN 3 PETUNJUK PENINGKATAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA : APA YANG DISARANKAN OLEH REDIP

Bab 14 Petunjuk Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama

Petunjuk seperti yang disarankan oleh hasil Eksperimen REDIP

Bab ini menguraikan beberapa petunjuk untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama di Indonesia, yang dikembangkan berdasarkan hasil-hasil dan pengalaman dari eksperimen REDIP. Petunjuk ini memberikan beberapa saran yang konkrit dan sudah diujikan di lapangan bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama secara efektif dan berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip Dasar

REDIP1 dimulai pada tahun 1999 dengan tiga prinsip dasar yang mengarah terbentuknya:

- (1) desentralisasi,
- (2) manajemen berbasis sekolah, dan
- (3) partisipasi masyarakat.

Ketiga prinsip itu sejalan dengan kebijakan pemerintah dan telah mengarah kepada bentuk baru REDIP yang berusaha memberdayakan sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah.

Administrasi Pendidikan di Daerah

Pertanyaan pokok mengenai administrasi pendidikan adalah bagaimana pemerintah Kabupaten/Kota harus mengelola sistem pendidikannya. Pengalaman REDIP menyarankan hal-hal berikut ini:

- Pentingnya melembagakan TPK sebagai organisasi tingkat kecamatan
- Tugas baru bagi pengawas sekolah sebagai pendamping lapangan dalam melaksanakan model REDIP
- Kesamaan hak untuk semua jenis sekolah
- Peran provinsi yang besar: pembuatan kebijakan oleh provinsi dan dukungan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pendanaan Pendidikan di Daerah

Pertanyaan pokok mengenai pendanaan sekolah adalah seberapa besar anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan, bagaimana mengalokasikan anggaran untuk sekolah,

dan bagaimana membelanjakan anggaran tersebut. REDIP telah menyarankan hal-hal berikut ini:

- Menjamin sekurang-kurangnya 20% anggaran untuk pendidikan di pemerintah kabupaten/kota
- Anggaran rutin sekolah diberikan dalam bentuk block grant melalui pengajuan proposal
- Alokasi berbasis rumus untuk block grant
- Mendanai TPK
- Mengkonsolidasikan keuangan sekolah dan mengharuskannya transparan

Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan yang lebih baik telah menjadi tujuan akhir dari program REDIP. Sejumlah pendekatan dapat diterapkan untuk mencapai tujuan itu, tetapi apa yang telah ditunjukkan REDIP merupakan pelajaran sederhana: peningkatan mutu hanya dapat dimulai dari guru. Secara lebih spesifik, kunci dari mutu yang lebih baik adalah motivasi guru. Oleh karena itu, pertanyaan pokoknya adalah bagaimana memotivasi guru untuk berprestasi tinggi. Saran-saran yang diajukan adalah:

- Menyediakan gaji yang lebih baik.
- Mendorong profesionalisme guru.
- Memberikan akses yang mudah bagi guru untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan baru.

Akses terhadap Pendidikan

Meskipun perhatian pemerintah Indonesia berpindah dari akses kepada mutu pada tahun-tahun ini, akses masih tetap menjadi isu penting di beberapa daerah, terutama di daerah yang miskin dan terpencil. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Depdiknas tidak lagi dapat menjadi ujung tombak bagi gerakan nasional untuk menciptakan akses yang lebih luas, dan tampaknya tidak ada lagi pihak yang ditugasi memecahkan masalah ini secara serius dan sistematis.

Meskipun sebagian besar kewenangan masalah administrasi pendidikan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah, menyediakan bangunan sekolah dan guru baru di daerah terpencil masih menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Isu tentang akses yang lebih membutuhkan perhatian pemerintah daerah atau perhatian perseorangan adalah kepada siswa dan keluarga mereka. Berbagai kegiatan REDIP secara langsung atau tidak langsung mengatasi masalah ini. Hasil-hasilnya menyarankan beberapa rekomendasi berikut ini.

- **Meningkatkan jumlah penerimaan siswa baru:** Upaya bersama di tingkat daerah diperlukan dan TPK tampaknya paling tepat untuk melakukan tugas ini. Inovasi lain untuk meningkatkan akses adalah Konsorsium Sekolah Terbuka yang diprakarsai oleh KKKS. Semua sekolah di satu kecamatan membentuk konsorsium dan masing-masing menjadi "cabang SMP Terbuka" sehingga dapat menerima siswa SMP Terbuka terdekat.
- **Menurunkan Angka Putus sekolah :** Berbeda dengan pendaftaran siswa baru, sekolah dapat berbuat banyak untuk mengurangi angka putus sekolah. Angka putus sekolah jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya, dan alasan ekonomi bukan alasan utama seperti yang diperkirakan, tetapi alasan-alasan seperti perkawinan dini dan hilangnya minat belajar ditemukan lebih sering terjadi. Berbagai prakarsa sekolah dan TPK dapat mengubah situasi ini, seperti ditunjukkan di bawah ini:
 - Guru dapat meningkatkan pembelajaran di dalam kelas dengan menerapkan metode belajar aktif.
 - Guru dapat menetapkan sistem pembinaan sekolah yakni surat peringatan dikirimkan kepada orang tua murid segera sesudah ada murid diketahui sering tidak masuk.
 - Guru dapat mengunjungi rumah siswa untuk berbicara dengan siswa dan orang tuanya.
 - Sekolah dapat mengorganisasi kelas tambahan atau kelompok belajar di rumah dengan bantuan guru.
 - TPK dapat mengadakan kelompok pengawas yang secara rutin berpatroli di jalan untuk menemukan siswa yang tidak masuk.
 - TPK dapat mengadakan kampanye untuk mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan bimbingan kepada orang tua yang kurang perhatian, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, dan memprakarsai beasiswa kecamatan bagi siswa kurang mampu.

Hubungan Sekolah-Masyarakat

Alasan mengapa partisipasi masyarakat harus digalakkan adalah bahwa masyarakatlah yang menetapkan tingkat layanan pendidikan yang harus diberikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mereka menerima apa yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat adalah cara untuk "mencerahkan" masyarakat dan mewujudkan cita-cita pendidikan mereka. Sekolah adalah bagian dari masyarakat. Dalam era otonomi daerah, sekolah perlu menjangkau partisipasi masyarakat secara maksimal. Masyarakat selanjutnya harus terlibat dalam masalah-masalah sekolah.

Berdasarkan pemikiran seperti ini, pentingnya peran TPK tidaklah berlebihan. TPK adalah jembatan yang menghubungkan jarak yang jauh antara sekolah dan masyarakat. TPK adalah jalur yang menghubungkan masyarakat, dan sekolah dengan pemerintah Kabupaten/Kota. TPK merupakan lembaga yang sangat penting bagi pendidikan Indonesia untuk melangkah lebih jauh lagi.

Peran Departemen Pendidikan Nasional

Dengan mempertimbangkan situasi Indonesia sekarang dan perspektif jangka panjang, salah satu prioritas utama dari bangsa ini haruslah pendidikan. Depdiknas harus menjadi ujung tombak untuk menjadikan pendidikan sebagai agenda nasional. Sejak otonomi daerah, Depdiknas telah melimpahkan kewenangan tentang manajemen operasional sekolah kepada pemerintah kabupaten/kota. Perannya sekarang terbatas pada memberikan saran, koordinasi, dan menetapkan standar. Depdiknas telah menjadi mentor nasional tentang pendidikan untuk mengawasi pemerintah daerah.

1) Dua Prinsip untuk Proyek dan Program Pendidikan

Sampai hari ini, Depdiknas masih mengatur sejumlah proyek dan program, yang didanai sendiri atau dana dari lembaga donor, yang menyediakan dana untuk peningkatan pendidikan. Pengalaman REDIP menyarankan bahwa dua prinsip di bawah ini harus diterapkan terhadap proyek/program tersebut:

- Keleluasaan untuk memilih
- Bukan pembangunan kapasitas, tetapi pemberian kesempatan

2) Mendefinisikan Mutu Pendidikan

Meskipun mutu pendidikan semakin penting, belum ada definisi yang jelas tentang mutu pendidikan dari Depdiknas. Jika kita harus menentukan apakah mutu dapat dicapai, kita perlu memiliki definisi mutu yang jelas dan, selanjutnya, metode yang tepat untuk mengukur mutu. Depdiknas bertanggungjawab untuk memperjelas masalah ini menjadi lebih sederhana dan mendefinisikan mutu dengan istilah yang operasional dan terukur yang dipahami oleh semua orang. Depdiknas perlu mendidik stakeholder dengan memberikan pengertian yang jelas tentang mutu pendidikan.

3) Membangun Kapasitas Pelatihan Lembaga

Secara nyata diperlukan pelatihan mutu yang dilembagakan dan mencakup topik yang luas seperti manajemen berbasis sekolah, manajemen keuangan dan transparansi, manajemen organisasi, ketrampilan teknis seperti pelatihan komputer, akuntansi, manajemen penyediaan barang atau perpustakaan. Meskipun banyak modul pelatihan yang baru telah

dikembangkan dan diujikan di lapangan, dengan sejumlah narasumber yang terlatih dan siap menggunakannya, belum ada rencana untuk membentuk sistem yang melembaga agar dapat digunakan secara efektif. Di antara masalahnya adalah kurangnya kejelasan peraturan tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap manajemen dan implementasi program. Jika mutu sistem pendidikan perlu ditingkatkan, masalah pelatihan profesional, teknis dan dukungan harus diatasi secepat mungkin.

4) Menciptakan Sistem untuk Mendiseminasikan Bahan Pengembangan Profesional

Di bawah REDIP2, tim MGMP dan guru-guru berkesempatan menerapkan kemampuan kreatifnya dan mengembangkan sejumlah alat bantu pendidikan seperti bagaimana melakukan pembelajaran aktif, panduan, buku latihan, rencana pengajaran, modul pembelajaran, dsb. Bagaimana bahan-bahan yang sangat baik ini dapat disebarakan kepada sekolah dan kabupaten di seluruh Indonesia? Lembaga paling tepat untuk mengembangkan sistem pengumpulan, evaluasi dan diseminasinya adalah Depdiknas. Depdiknas dapat mengimplementasikan sistem ini secara langsung atau sekedar mengelola sistem ini dengan menyerahkan implementasi sistem itu kepada sektor swasta atau universitas.

Bab 15 Rencana Implementasi Petunjuk Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama

Dua Pendekatan untuk Implementasi

Jika petunjuk akan dilaksanakan untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama di Indonesia, dua cara berikut harus dilaksanakan secara bersama-sama:

- (1) **Strategi Pelembagaan:** Pelembagaan menjamin peningkatan yang seragam dan luas di seluruh sistem. Tetapi, ini biasanya memerlukan pembahasan panjang dan waktu yang lama untuk mencapainya. Juga akan berhadapan dengan kebinekaan Indonesia, yang sangat tidak mendukung keseragaman.
- (2) **Pendekatan Program:** Pendekatan program adalah pendekatan yang kecil, tahap demi tahap terhadap peningkatan yang bersistem. "perubahan kecil-kecil untuk mencapai peningkatan bersistem" tampaknya seperti bertentangan, tetapi dalam konteks Indonesia, ini lebih praktis, dan barangkali menjadi cara paling efektif untuk menanamkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"REDIP Baru" JICA

Sebagai penerapan praktis pendekatan program, JICA telah mulai program REDIP yang lain ("REDIP baru") pada tahun 2004 yang meliputi dua kabupaten di Jawa Tengah, 1 kota di Sulawesi Utara dan 2 kabupaten di Banten. Ciri utama program itu tetap tidak berubah tetapi beberapa aspek baru telah diperkenalkan. Dua di antaranya adalah:

- (1) Pengurangan secara bertahap bantuan keuangan JICA
- (2) Pengawas mengambil alih peran konsultan lapangan REDIP

Seperti terlihat, dua perubahan dimaksudkan untuk menjadikan program itu berkelanjutan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. "REDIP baru" akan berlangsung selama empat tahun sampai tahun 2008 dan diharapkan dua kabupaten di Jawa Tengah dan satu kota di Sulawesi Utara akan sepenuhnya "lulus" pada akhir periode itu.

Model REDIP sebagai Cara untuk Menggunakan Anggaran Sekarang secara lebih Efektif

Semua kegiatan pemerintah harus didanai dengan dana pemerintah. Mengimplementasikan petunjuk peningkatan pendidikan menengah pertama secara nasional memerlukan jumlah anggaran yang sangat besar yang harus dikeluarkan untuk setiap tingkat pemerintahan. Ada beberapa kesulitan teknis dalam implementasinya juga. Tetapi, harus ditekankan bahwa *dari sudut pandang keuangan, apa yang disarankan Petunjuk itu bukan "masalah yang*

begitu besar” seperti kelihatannya, karena saran itu lebih terkait dengan “bagaimana secara efektif membelanjakan anggaran sekarang” daripada dengan “berapa banyak ditambahkan terhadap anggaran sekarang.” Dengan kata lain, Petunjuk tidak dimaksudkan untuk menyarankan “pembelanjaan tambahan baru” tetapi untuk menunjukkan “bagaimana uang itu dapat digunakan secara efektif.” Inilah esensi dari model REDIP dan, sejauh hal ini dipahami, hal-hal teknis dapat diatasi dengan satu atau lain cara.

